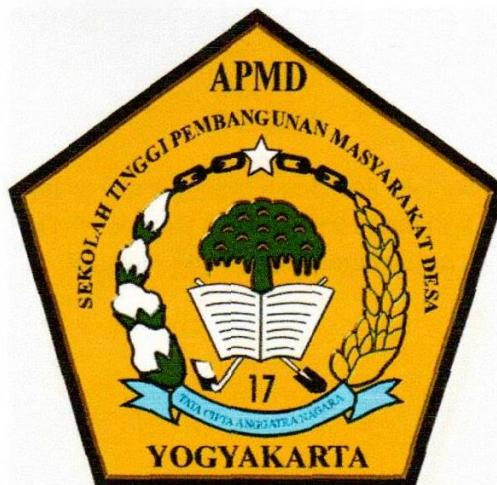


SKRIPSI

**PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA**



Disusun Oleh:

YOSUA KRISTIAN LIKU

21520057

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA

SKRIPSI

Diajukan Guna Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

Penguji Samping 1



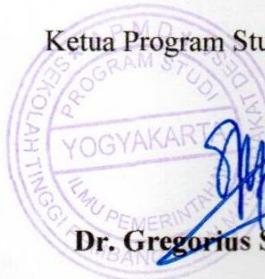
Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S. H., M.Hum

Penguji Samping 2



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yosua Kristian Likku

NIM : 21520057

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Yosua Kristian Likku

21520057

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Yosua kristian Likku

NIM : 21520057

Telp : 081337492352

Email : -

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA" beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Yosua Kristian Likku
21520051

HALAMAN MOTTO

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.”

Amsal 3:5-6

“Pemuda sejati adalah mereka yang berpikir, berjuang, dan tidak tunduk pada ketakutan.”

Tan Malaka

“Tak secerdas yang lain, tapi tak pernah berhenti.
Karena selalu ada jalan bagi yang terus berdiri.”

Dakku pade ma a,linana ata wadekka,dakku pernahma bakku saduka karena wai,i
wai,i lara bagi a dede

Yosua Kristian Likku

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemerintah Kalurahan Triwidadi Dalam Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Karang Taruna” dengan baik untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmah dan kesehatan
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak tercinta Samuel Seingu Lede dan ibu tercinta Elisabet Pudu Rabi. Terima kasih kepada bapak dan Ibu yang telah melahirkan dan mendukung saya sampai saat ini.
3. Kepada kakak saya Janwar Dega Likku, dan adik saya Debora loba Likku, Imanuela junegu Likku, Jonathan Omega Lkku. Dan juga tante saya Ibu Lali Likku. Yang sudah mendoakan saya dan juga mendukung saya hingga menyelesaikan skripsi saya.
4. Kepada seluruh keluarga Besar Uma Kabelak Family terimakasih yang selalu membantu dan mendorong serta mendukung saya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perlindungan dan penyertaan-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Karang Taruna” dengan baik. Untuk penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan. S.I.P., M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi dukungan banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Pemerintah dan Masyarakat Desa Kalurahan Triwidadi yang sudah mengijinkan penulis untuk meneliti
7. Kepada teman-teman Keluarga Besar HIPMASBA Himpunan Mahasiswa Sumba Barat Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD di Yogyakarta.
8. Kepada keluarga seperjuangan saya yaitu Organisasi Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta sebagai ruang diskusi dan berdinamika saya.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kontribusi yang sudah diberikan. penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, segala masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

10. Kepada kelompok 10 KKN dan perjuangan Kapanewon Pajangan sebagai teman canda tawa dan berbagi cerita.
11. Kepada Keluarga kecil Uma Kabelak Jogja sebagai tempat saya bercerita dan berbagi rasa tentang pahitnya sebuah proses.
12. Untuk saya sendiri yang selalu berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa henti.

Yogyakarta, 09 Juli 2025

Penulis



Yosua Kristian Likku

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Fokus penelitian.....	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	9
1. Tujuan penelitian	9
2. Manfaat penelitian	10
E. <i>Literatur Review</i>	10
F. Kerangka Konsep.....	18
1. Pemerintah Desa	18
2. Manajemen Organisasi	22
3. Karang Taruna	28
4. Kapasitas Tata Kelola	31
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Unit Analisis Penelitian.....	34

3. Metode Pengumpulan Data.....	36
4. Teknik Analisis Data	38
BAB II TATA KELOLA KARANG TARUNA KALURAHAN	
TRIWIDADI.....	42
A. Kondisi Kalurahan	42
B. Kondisi Geografis.....	46
1. Luas Wilayah	46
2. Batas Wilayah	46
3. Letak Wilayah.....	47
4. Orbitasi	48
5. Karakteristik Kalurahan.....	48
C. Kondisi Demografi	48
1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
2. Penduduk Berdasarkan Usia	50
3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
D. Sosial dan Ekonomi	55
1. Sosial.....	55
2. Ekonomi.....	55
3. Sarana dan Prasarana, Pemukiman serta Infrastruktur Umum	56
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi	62
F. Sejarah Dan Latar Belakang Karang Taruna Asung Bahkti	65
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM	
PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA.....	69
A. Penyajian Data dan Analisis	71
1. Peningkatan Kemampuan Individu Dalam Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap	71
2. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Dalam Organisasi Dan Manajemen, Keuangan Dan Budaya	83
3. Peningkatkan Kemampuan Masyarakat Dalam Kemandirian, Keswadayaan Dan Mengantisipasi Perubahan.	90

BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan	35
Tabel 2. 1 Nama-Nama Lurah Sesudah Berdirinya Kalurahan Triwidadi	44
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 2. 3, Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	50
Tabel 2. 4, Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 2. 6 Jumlah Sarana Olahraga.....	58
Tabel 2. 7 Jumlah Fasilitas Pendidikan	58
Tabel 2. 8 Jumlah Fasilitas Kesehatan	59
Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Peribadahan	60
Tabel 2. 10 Susunan Pamong Kalurahan Triwidadi	64
Tabel 2. 11 Susunan Padukuhan Kalurahan Triwidadi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Susunan Personalia Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan.....	63
Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi	66
Gambar 3.1 RAB.....	74
Gambar 3.2 Persiapan Porkal	76
Gambar 3.3 Pelatihan Kepemimpinan	80
Gambar 3.4 pelatihan di Kalurahan	85

INTISARI

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala dalam tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah desa dan pemuda dalam pengembangan kapasitas organisasi Karang Taruna agar mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif dan berkelanjutan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam meningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna agar mampu berfungsi secara optimal dalam pemberdayaan generasi muda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus Karang Taruna, dan anggota masyarakat yang relevan. Teknik analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, organisator, motivator, dan inovator dalam mendukung peningkatan kapasitas Karang Taruna. Pemerintah desa memberikan dukungan melalui pelatihan, fasilitasi kegiatan, pembinaan kelembagaan, serta mendorong partisipasi aktif pemuda. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi anggota, dan lemahnya perencanaan strategis. Meskipun demikian, kolaborasi yang dibangun telah menunjukkan peningkatan peran Karang Taruna dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Karang Taruna, Tata Kelola, Kapasitas Organisasi, Pemberdayaan Pemuda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif melalui pembangunan untuk mendorong kemajuan desa. Kemajuan sebuah desa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, termasuk peran aktif pemuda dan pemerintah desa. Pemuda memegang peran penting sebagai generasi penerus yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral, berperilaku positif, memiliki semangat untuk membangun, mencintai tanah air, serta memiliki visi dan tujuan yang konstruktif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan pemuda dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipahami sebagai komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Kewenangan tersebut dilandasi oleh prakarsa warga, hak asal-usul, serta tradisi yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa desa menjadi salah satu wilayah yang dihormati sesuai dengan hak asal atau Prakarsa masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa berfungsi sebagai institusi yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program yang memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat kelembagaan desa. Kepala desa berperan penting dalam mengelola pemerintahan desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, termasuk membina serta meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna.

Saat ini, jumlah pemuda di Indonesia mencapai sekitar 64,19 juta jiwa atau sekitar 25,02% dari total populasi. Jumlah yang besar ini merupakan potensi strategis yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah guna mencetak generasi yang berkualitas, karena mereka yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Sejarah mencatat bahwa pemuda selalu memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah berdirinya organisasi Boedi Oetomo, yang menjadi wadah perjuangan para pemuda untuk kemerdekaan. Semangat perjuangan itu kemudian berlanjut melalui Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda sebuah momen bersejarah yang membangkitkan semangat persatuan pemuda di seluruh tanah air. Peran penting lainnya tampak saat para pemuda mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, pemuda juga aktif dalam mempertahankan kemerdekaan serta terus bergerak melawan berbagai bentuk ketidakadilan di negeri ini.

Melihat besarnya kontribusi pemuda terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat disimpulkan bahwa kemajuan Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan aktif generasi mudanya. Pemuda dikenal memiliki

semangat tinggi dan emosi yang kuat, yang perlu diarahkan secara tepat agar energi tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan bernegara. Pemuda memiliki berbagai potensi seperti kecerdasan intelektual, emosional, sosial, seni, dan bahasa. Jika potensi ini dikembangkan secara optimal, akan menjadi bentuk kecerdasan nyata yang mendukung pencapaian prestasi serta kesuksesan generasi muda. Selain itu, pemuda juga memiliki nilai-nilai moral yang apabila dibina dan dimatangkan, dapat menjadi kekuatan moral yang positif dan berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan nasional.

Di era revolusi industri 4.0, peran generasi muda menjadi semakin signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat cepat dan membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi tidak lagi sekadar digunakan untuk hiburan atau membantu pekerjaan, melainkan suda di anggap hal-hal yang sangat dibutuhkan dari aktivitas sehari-hari. Perkembangan ini akan terus berlanjut karena berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan evolusi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, pemuda memiliki peran sentral, karena mereka yang paling adaptif dan mampu mengikuti dinamika teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Besarnya jumlah dan peran pemuda dalam sejarah bangsa serta potensi pemuda pada masa kini, tentu perlu di organisasikan dengan baik agar kaum muda ini dapat berperan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Proses pembinaan dan pengelolaan pemuda dapat dilakukan melalui organisasi karang taruna. Karang taruna merukan organisasi kepemunduan yang menjadi wadah

partisipasi masyarakat untuk melakukan pembinaan dengan tujuan untuk memunculkan rasa tanggung jawab sosial dan bermanfaat bagi masyarakat, (Gazalin, dkk, 2023).

Sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang menyatakan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai ruang dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Menurut UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Organisasi kepemudaan sangat penting dalam Upaya pemberdayaan pemuda untuk memupuk rasa kepedulian, nasionalisme, mengembangkan kemampuan, minat, bakat, meningkatkan kesuawadayaan dan penanggulangan hal-hal negatif. Sasaran yang ingin dicapai oleh Karang Taruna dititik beratkan pada kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mewujudkan dengan baik kesejahteraan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka tugas pokok Karang Taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi berbagai masalah pembangunan

sehingga potensi karang taruna dapat dirasakan oleh masyarakat di lingkungannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, serta Karang Taruna merupakan bagian dari struktur kelembagaan desa yang berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong pemberdayaan pemuda, serta mendorong pengembangan kapasitas masyarakat di tingkat desa.

Peran aktif pemerintah desa, yang disertai dukungan dari berbagai unsur masyarakat terutama pemuda yang terorganisasi dalam Karang Taruna menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Karang Taruna sendiri memiliki fungsi sebagai wadah pengembangan generasi muda, khususnya di wilayah perdesaan. Organisasi ini menjadi media bagi pemuda untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sosial, pembangunan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 memberikan panduan umum mengenai peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki misi utama dalam pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut. Karang Taruna diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, Keputusan Gubernur DIY Nomor 227/KEP/2022 tentang pengutusan pengurus, majelis dan pengembangan Karang Daerah Istimewa Yogyakarta Asung Bahkti 2022-2027, menegaskan pentingnya struktur organisasi yang solid guna

mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Regulasi ini juga mencakup rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan yang dirancang untuk meningkatkan mutu program-program Karang Taruna, seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi pemuda. Karang Taruna juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan ruang yang kondusif bagi pengembangan potensi generasi muda. Dengan peran tersebut, Karang Taruna bukan hanya tempat berkegiatan bagi pemuda, tetapi juga agen perubahan sosial di tengah masyarakat.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan disusun sebagai dasar hukum yang mengatur keberadaan dan aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat kalurahan (Kalurahan) di wilayah Kabupaten Bantul, termasuk organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Regulasi ini menitikberatkan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lokal.

Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah memberikan kejelasan ruang gerak bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Melalui keberadaan lembaga kemasyarakatan, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, serta turut serta dalam menjalankan program-program yang telah dirancang pemerintah desa. Dengan adanya landasan hukum ini, pelaksanaan kegiatan oleh lembaga-lembaga tersebut diharapkan menjadi lebih terkoordinasi dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, sehingga mampu meminimalkan potensi tumpang

tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan. Saat ini, Karang Taruna sebagai wadah kepemudaan yang bersifat sosial telah menjangkau hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan di Indonesia. Organisasi ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial, kegiatan ekonomi produktif, pariwisata, olahraga, keagamaan, hingga seni dan budaya. Sebagai sebuah organisasi sosial, Karang Taruna memerlukan sistem administrasi yang solid guna memastikan setiap aktivitas dapat dikelola secara sistematis dan terarah.

Pengelolaan administrasi yang baik sangat penting untuk menciptakan tata kelola organisasi yang tertib, terstruktur, dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi akan menjadi lebih mudah dan efektif. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan penerapan manajemen kinerja yang optimal, pengelolaan organisasi secara disiplin, serta penyediaan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kalurahan memiliki peran strategis sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan desa. Namun, realitas yang terjadi di Kalurahan Triwidadi menunjukkan bahwa Karang Taruna Asung Bahkti belum mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

Permasalahan mendasar yang dihadapi terletak pada lemahnya peran strategis Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam mendorong peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tersebut. Pembinaan organisasi yang

dilakukan masih jauh dari maksimal, sehingga berdampak pada stagnansi perkembangan Karang Taruna Asung Bahkti sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat desa.

Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya disfungsi dalam tata kelola Karang Taruna Asung Bahkti yang disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Pertama, rendahnya kapasitas internal organisasi dalam aspek manajerial dan tata kelola yang efektif. Kedua, minimnya dukungan komprehensif dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun pendampingan berkelanjutan.

Lebih spesifik lagi, terjadi stagnasi dalam sistem manajemen organisasi yang mengakibatkan Karang Taruna mengalami kondisi "mati suri" dalam operasionalnya. Koordinasi aktif antara Pemerintah Kalurahan dengan Karang Taruna Asung Bahkti juga mengalami kemunduran, sehingga harmonisasi dalam pembangunan desa menjadi terhambat.

Ketiadaan program pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan yang terencana secara sistematis dan berkelanjutan menjadi permasalahan kritis yang menimbulkan disorientasi organisasi. Kondisi ini berujung pada rendahnya keberdayaan anggota Karang Taruna dalam mengelola dan mengembangkan organisasinya secara mandiri. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam upaya peningkatan kapasitas tata kelola Karang Taruna Asung Bahkti.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana Pemerintah Kalurahan Triwidadi Dalam Peningkatan Kapasitas Karang Taruna?.

C. Fokus penelitian

1. Peningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Peningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya.
3. Peningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengambarkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ada di kalurahan triwidadi
- b. Mengambarkan peningkatan kemampuan kelembagaan dalam organisasi, dan manajemen keuangan dan budaya yang ada dikalurahan triwidadi
- c. Mengambarkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam, kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan yang ada dikalurahan triwidadi

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan individu dalam pengetahuan keterampilan, keuangan dan budaya dalam peningkatan kapasitas tata kelola karang taruna yang ada di kalurahan triwidadi.
- b. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan kelembagaan dalam organisasi, manajemen keuangan dan budaya dalam peningkatan kapasitas tata kelola karang taruna yang ada di kalurahan triwidadi
- c. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan masyarakat dalam kemandirian keswadayaan, dan mengantisipasi perubahan dalam peningkatan kapasitas tata kelola karang taruna yang ada dikalurahan triwidadi.

E. *Literatur Review*

Penilitian terdahulu pernah di lakukan oleh peniliti - peniliti lain, antara lain:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukti Herdiana, september tahun 2019 dengan judul “pemberdayaan karang taruna oleh pemerintah desa di desa winduraraja kecamatan kawali kabupaten ciamis” vol 06, no 03, hal 2614-2945, september tahun 2019 jurnal ini memfokuskan perhatian pada strategi dan peran pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan Karang Taruna yang berada di wilayah Desa Winduraraja, kecamatan kawali kabupaten ciamis, dalam upaya pemeberdayaan masyarakat.menjelaskan bahwa

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan secara optimal.masalah yang paling adalah kurangnya pemberdayaan karang taruna oleh pemerintah desa winduraraja sehingga mengakibatkan organisasi tersebut belum mampu memaksimal potensi anggota yang ada.disisi lain ada beberapa program, seperti kewirausahaan dan turnamen olahraga,seharusnya mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah desa.namun,partisipasi pemerintah desa,terutama dalam hal pendanaan, masih sangat minim.kendala yang dihadapi meliputi kurangnya kordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan karang taruna,terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya anggaran.adapun pembahasan dari jurnal ini mengatakan bahwasanya untuk mengatasi kendala dan hambatan perlu adanyabimbingan,pengembanganprogram,pengawasan,pembina an,serta pengalangan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nansi Riandita, Erma Sarfah,2021 dengan judul ‘Tata Kelola Dana Desa Karang Taruna Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah” Vol 03, No 02, Hal 127–130, 2021 mengkaji mengenai tata kelola dana desa yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.dalam penelitian ini menunjukan bahwa tata Kelola dana desa oleh karang taruna desa Nakau telah melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota karang taruna dan

masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dana desa dan perluasan pemanfaatan dana desa untuk program-program yang lebih bermanfaat (inklusif). Adapun pembahasan dari penilitian ini bahwasanya perlu adanya peningkatan kapasitas dan transparansi dalam tata Kelola dana desa guna untuk memastikan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan masyarakat desa Nakau secara berkelanjutan.

3. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eben Rian Langkay, Salmin Dengo, Helly Febrina Kolondam 2022 dengan judul “Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan” Vol.VIII, No.114, Hal. 2338 – 9613 jurnal ini membahas mengenai Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Membahas bahwa pemberdayaan organisasi karang taruna memiliki peran yang strategis dalam pengembangan potensi generasi muda dan pemberdayaan masyarakat. organisasi karang taruna berbeda dari organisasi kepemudaan lainnya, baik dari sisi fungsi maupun posisinya dalam masyarakat. tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan karang taruna yang

dilakukan di Desa Tewesen, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemberdayaan melalui peran fasilitatif dan edukatif telah dilakukan tetapi belum mencapai Tingkat optimal. Adapun pembahasan dari jurnal ini mengatakan, bahwasanya untuk mencapai hasil yang optimal perlu adanya penguatan strategi dan pelaksanaan agar pemberdayaan karang taruna dapat lebih efektif dalam menjalankan peranya.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Neng Yeyet 2019 dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis” yang dipublikasikan dalam dinamika: jurnal ilmiah ilmu aministrasi negara, Vol 06, No 04, Hal 2614-2945, Desember 2019. Jurnal ini mengidentifikasi berbagai dinamika dalam pembinaan organisasi karang taruna yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dimana pemerintah desa telah berupaya melakukan pembinaan terhadap karang taruna, namun hasilnya belum optimal. dikarenakan kurangnya pelatihan berbasis teknologi informasi, lemahnya partisipasi kebersamaan antara anggota karang taruna, serta terbatasnya dana bantuan anggaran dari pemerintah desa dan adanya perbedaan argument pendapat antara pemerintah desa dan karang taruna. Adapun pembahasan dari jurnal ini mengatakan, bahwasanya untuk mengatasi beberapa masalah di atas, perlu adanya pemberian arahan, penjelasan tujuan yang ingin di capai, dan bimbingan

anggota karang taruna untuk merumuskan visi misi, serta mengelola keuangan secara mandiri melalui pengajuan dana.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andri, Isabella, Amaliatul Walidain 2023 dengan judul “Kontribusi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Karang Taruna” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri, Vol 10, No 01, Hal 2716-3474, Oktober 2023 membahas mengenai kontribusi dan peran penting pemerintah Desa dalam upaya mendukung pemberdayaan Karang Taruna. menjelaskan bahwa perlunya kontribusi pemerintah desa memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan organisasi karang taruna. disisi lain pemerintah desa juga tidak hanya bertindak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga harus sebagai pengarah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi partisipasi masyarakat melalui pemahaman peran berdasarkan norma, dan perilaku. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan karang taruna di tentukan oleh tindakan yang nyata kepala desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta pentingnya memainkan sebuah peran demi membangun sebuah kepercayaan dan komitmen.
6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mikael Thomas Susu, Frans Bapa Tokan, Yosef Dionisius Lamawuran 2024 dengan judul “Penguatan Kelembagaan Karang Taruna untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten

Flores Timur,” yang dipublikasikan di jurnal jurnal kreativitas pengabdian kepada masyarakat, Vol.7, No.9, Hal.4001-4011, membahas mengenai tantangan utama stagnasi karang taruna nubun tawan desa sandosi yang dimana rendahnya pembinaan pemerintah desa, lemahnya tata Kelola organisasi, dan kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa pentingnya pendampingan Lembaga pemuda, selain itu pendampingan yang di berikan mampu memperbaiki tata Kelola organisasi karang taruna nubun serta berdampak positif pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pemmbangunan desa.

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rendra Khaldun juli 2016 dengan judul “Pemberdayaan (Pemuda) Karang Taruna Dalam Meningkatkan Dan Menumbuhkan Minat Bisnis Kreatif Di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat” yang disampaikan di jurnal Transformasi Vol. 12, No. 2, Hal. 168-185 membahas mengenai pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan di Desa Giri Madia dengan tujuan sebagai upaya mengatasi tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan kecakapan hidup tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengali sebuah potensi kreatif pemuda melaui pelatihan kewirausahaan. penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang strategi pemberdayaan pemuda di Tingkat lokal

sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Junaid Gazalin, La Asiri, Sry Mayunita, Ade Rahman, dan Hengky (Juni 2023), dalam artikel berjudul "*Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna dalam Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kinerja Organisasi*" yang diterbitkan dalam *Community Development Journal* Vol. 4, No. 2, halaman 3183–3190, membahas urgensi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas pengurus Karang Taruna. Tujuannya adalah agar para pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara lebih profesional. Dalam konteks ini, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang turut berperan dalam pembangunan sosial, memerlukan pedoman operasional yang sistematis dan terarah. Keberadaan SOP dinilai penting sebagai landasan kerja yang mampu meningkatkan efektivitas serta kesinambungan kinerja organisasi. Selain itu, SOP juga menjadi pijakan awal dalam membangun karakter organisasi yang profesional dan berdaya saing, khususnya di tingkat desa.
9. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisa Indrawati, Aminatuzzuhro, Andi Iswoyo 2023 dengan judul “*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna Dalam Mengembangkan Desa 1001 Tanaman Hias di Kabupaten Gresik*” yang disampaikan di jurnal Mitra dalam Pengabdian, Vol.6, Hal. 2655-3570 penelitian ini berupaya dengan tujuan mmeningkatkan kapasitas kelembagaan karang taruna serta mendukung pengembangan UMKM tanaman hias di Desa Banyu Urip,Kecamatan Kedamean,Kabupaten Gresik.permasalahan utama

yang di hadapi adalah kurangnya kesadaran anggota karang taruna dalam menjalankan kelembagaan,dan kurangnya pemahaman UMKM tanaman hias tentang strategi branding serta minimnya informasi Lokasi sentra UMKM.Adapun pembahasan dalam jurnal ini,bahwasanya untuk untuk mengatasi masalah yang di hadapi perlu adanya perlu adanya pelatihan penyusunan job description struktur organisasi Karang Taruna, inisiasi pengembangan lembaga belajar,serta pemasaran berbasis media online dan geolocation melalui Google Maps untuk UMKM tanaman hias,demi menunjukan bahwa kapasitas kelembagaan karang taruna meningkat secara segnifikan serta UMKM tanaman hias mampu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif melalui media online dan pemanfaatan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM di Tingkat desa.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2019) berjudul "*Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang*", diterbitkan dalam Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI, Vol. 8, No. 03, edisi Mei–Agustus 2019, mengkaji peran penting pemuda dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat, dengan Karang Taruna sebagai wadah fasilitasi peran tersebut. Studi ini menyoroti bagaimana Karang Taruna terlibat dalam berbagai bidang kegiatan sosial, yang pada dasarnya menunjukkan potensi strategis organisasi ini sebagai motor penggerak perubahan sosial. Meskipun keterlibatan tersebut sudah cukup luas, penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan

kapasitas sumber daya manusia khususnya anggota Karang Taruna guna mengoptimalkan peran mereka sebagai agen perubahan. Hal ini dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan dan visi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

F. Kerangka Konsep

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana Pemerintah Kalurahan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah Kalurahan mempunyai peran yang penting dalam mengatur kehidupan social masyarakat Kalurahan dan mendukung pembangunan nasional. oleh karena itu, dibutuhkan adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang bersangkutan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan Kalurahan, agar proses pemerintahan berjalan lebih efektif. Pemerintah Kalurahan terdiri dari Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, yang meliputi sekretaris Kalurahan dan perangkat lainnya. Kalurahan itu sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat Istimewa. pemikiran dalam penyelenggaraaan

pemerintahan Kalurahan melibatkan keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. pemerintah Kalurahan merupakan bagaian sistem dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat (Widjaja, 2003:3).

Secara etimologis, kata "pemerintahan" berasal dari kata dasar "perintah" yang diberi awalan "pe-" dan akhiran "-an", membentuk istilah yang menggambarkan suatu proses atau sistem dalam pelaksanaan kekuasaan. Penting untuk memahami perbedaan antara istilah "pemerintah" dan "pemerintahan". "Pemerintah" merujuk pada institusi atau lembaga resmi yang memiliki wewenang dalam menjalankan kekuasaan negara, sementara "pemerintahan" lebih mengacu pada cara kerja, prosedur, atau proses dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Kata "perintah" sendiri secara konseptual mengandung beberapa unsur penting: pertama, adanya dua pihak yang berinteraksi; kedua, pihak pemberi perintah yang dalam konteks ini adalah pemerintah atau otoritas; ketiga, pihak yang menerima perintah yakni rakyat atau masyarakat; dan keempat, adanya hubungan yang mengikat antara kedua pihak tersebut dalam suatu sistem kekuasaan (Syafiie, 2015).

Lebih jauh lagi, menurut pandangan Strong, pemerintahan dalam arti luas mencakup fungsi dan wewenang untuk menciptakan stabilitas dan menjaga ketertiban baik di dalam negeri maupun dalam hubungan luar negeri. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintahan memerlukan tiga

unsur utama, yaitu: kekuatan pertahanan atau militer untuk menjaga keamanan nasional; kekuatan legislatif dalam bentuk lembaga pembuat undang-undang; serta kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara untuk menunjang operasional pemerintahan secara menyeluruh (dalam Syafiee, 2015).

Pemerintah sebenarnya tidak hanya sebatas lembaga resmi, tapi juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam keluarga atau kelompok sosial lainnya, kita sudah bisa melihat adanya semacam hubungan yang mengatur cara kita berinteraksi satu sama lain. Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, punya kebutuhan dasar seperti rasa aman, tempat tinggal, pakaian, dan makanan yang harus dipenuhi bersama-sama (Rasyid, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan itu, orang tidak bisa hidup sendiri. Dibutuhkan kerja sama, komunikasi, dan aturan yang disepakati agar hidup jadi teratur. Di sinilah fungsi pemerintah mulai terasa, yaitu sebagai pihak yang mengatur dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Pemerintah tidak hanya membuat aturan, tapi juga membantu menciptakan suasana yang tertib dan aman untuk semua orang.

Jalannya pemerintahan bergantung pada adanya kerja sama antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari layanan atau kebijakan tersebut. Oleh karena itu, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling percaya antara keduanya menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola negara yang damai.

Secara umum, pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu sistem organisasi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan hukum dalam suatu wilayah tertentu (Sumaryadi, 2016). Tugas pemerintahan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merupakan komponen utama dalam struktur kenegaraan yang memiliki peran dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Secara umum, istilah pemerintah dapat dipahami dalam dua pengertian, yakni secara luas dan secara sempit. Dalam pengertian luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi negara dan melaksanakan tugas pemerintahan atas nama negara (Manan, 2001:101).

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih terbatas, istilah pemerintah merujuk pada lembaga eksekutif yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Di tingkat lokal seperti kalurahan, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala kalurahan beserta perangkatnya yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah kalurahan.

Salah satu peran penting pemerintah adalah sebagai regulator, yaitu pihak yang menetapkan arah dan aturan dalam pembangunan. Melalui kebijakan dan peraturan, pemerintah menciptakan pedoman bagi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan bisa

berjalan dengan teratur dan seimbang. Dalam perannya tersebut, pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menjadi fasilitator dalam mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Rasyid & Lobolo, 2010:32).

2. Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Robbins dan Coulter (2018) mendefinisikan manajemen sebagai proses koordinasi aktivitas kerja sehingga aktivitas tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Konsep ini menekankan bahwa manajemen bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan kontribusi setiap individu dalam organisasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Griffin (2017) memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa manajemen organisasi adalah serangkaian aktivitas yang diarahkan pada sumber daya organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua aspek ini menjadi indikator utama keberhasilan

manajemen organisasi dalam konteks apapun, termasuk organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna.

Daft (2016) memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menjelaskan bahwa manajemen organisasi merupakan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Definisi ini menggarisbawahi empat fungsi utama manajemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik manajemen yang baik.

2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen Organisasi

a. Perencanaan sebagai Fondasi Manajemen

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling fundamental karena menjadi dasar bagi seluruh aktivitas organisasi. Koontz dan Weihrich (2019) menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Proses ini melibatkan analisis situasi saat ini, penetapan tujuan masa depan, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks organisasi kepemudaan, perencanaan yang baik akan menentukan arah dan fokus kegiatan yang akan dilakukan, serta bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal.

Stoner, Freeman, dan Gilbert (2018) menekankan bahwa perencanaan yang efektif harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Hal ini sangat relevan dalam konteks organisasi kepemudaan yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Kemampuan untuk merevisi dan menyesuaikan rencana berdasarkan kondisi yang berkembang menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi organisasi.

b. Pengorganisasian sebagai Struktur Pendukung

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi. Robbins dan Judge (2019) menjelaskan bahwa pengorganisasian melibatkan penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan dimana keputusan harus dibuat. Struktur organisasi yang baik akan memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang efektif antaranggota.

Jones (2020) memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa pengorganisasian yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik unik organisasi, termasuk ukuran, kompleksitas, dan lingkungan operasional. Dalam konteks Karang Taruna, struktur

organisasi harus disesuaikan dengan sifat kegiatan yang dilakukan, karakteristik anggota, dan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

c. Kepemimpinan sebagai Motor Penggerak

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Northouse (2021) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses dimana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dalam organisasi kepemudaan memerlukan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan anggota untuk berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Yukl (2020) menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif harus adaptif dan situasional. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan karakteristik pengikut, sifat tugas, dan konteks situasional. Dalam organisasi kepemudaan, kepemimpinan transformasional seringkali lebih efektif karena dapat menginspirasi anggota untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi lebih dari yang diharapkan.

d. Pengendalian sebagai Mekanisme Evaluasi

Pengendalian merupakan proses monitoring, membandingkan, dan mengoreksi kinerja. Schermerhorn (2017) menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Fungsi ini

melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan.

Bateman dan Snell (2018) menekankan pentingnya sistem pengendalian yang proaktif daripada reaktif. Organisasi harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah yang serius dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Dalam konteks Karang Taruna, sistem pengendalian yang efektif akan membantu organisasi untuk tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

2.2 Prinsip-Prinsip Manajemen Organisasi

a. Prinsip Partisipasi dan Keterlibatan

Manajemen organisasi modern menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Deci dan Ryan (2017) dalam teori motivasi intrinsik menyatakan bahwa keterlibatan aktif anggota dalam proses manajemen akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap organisasi. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks organisasi kepemudaan dimana partisipasi aktif merupakan esensi dari pemberdayaan pemuda.

b. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Kaptein (2019) menekankan bahwa transparansi dalam manajemen organisasi menciptakan kepercayaan dan legitimasi organisasi di mata stakeholder. Transparansi melibatkan keterbukaan informasi tentang

kinerja organisasi, penggunaan sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas, di sisi lain, berkaitan dengan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasilnya kepada stakeholder.

c. Prinsip Pembelajaran Berkelanjutan

Senge (2020) dalam konsep *learning organization* menyatakan bahwa organisasi harus mampu belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Organisasi pembelajaran adalah organisasi dimana anggota secara kontinyu memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan.

2.3 Kualitas Manajemen Organisasi

a. Struktural

Struktural manajemen organisasi berkaitan dengan bagaimana organisasi mengatur struktur formal, pembagian kerja, dan mekanisme koordinasi. Mintzberg (2019) mengidentifikasi bahwa struktur organisasi yang efektif harus mampu memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang lancar antar bagian organisasi. Dalam konteks Karang Taruna, struktur yang tepat akan memungkinkan setiap anggota untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas.

b. Proses

Proses berkaitan dengan bagaimana organisasi menjalankan aktivitas manajemen sehari-hari. Hammer dan Champy (2018)

menekankan pentingnya reengineering proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Proses manajemen yang baik harus dapat memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan.

c. Budaya

Schein (2017) mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang dipelajari oleh kelompok dalam mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya organisasi yang kuat akan menjadi perekat yang mengikat anggota organisasi dan memberikan identitas yang jelas. Dalam organisasi kepemudaan, budaya yang positif akan mendorong partisipasi aktif dan komitmen jangka panjang anggota.

d. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Noe, Hollenbeck, Gerhart, dan Wright (2020) menekankan bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Hal ini meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan retensi anggota organisasi. Dalam konteks Karang Taruna, pengembangan kapasitas anggota menjadi investasi jangka panjang untuk keberlanjutan organisasi.

3. Karang Taruna

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1, Karang Taruna merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi generasi muda dalam

mengembangkan potensi diri. Organisasi ini tumbuh dari kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial generasi muda, serta diselenggarakan oleh dan untuk mereka sendiri, dengan tujuan utama mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, pemuda dipandang sebagai individu yang memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penerus perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan bangsa (Suradi, 2019:242).

Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi dirinya demi tercapainya cita-cita nasional. Berbagai program yang diselenggarakan dalam organisasi Karang Taruna memberikan ruang bagi pengembangan potensi dan pembentukan karakter generasi muda. Karang Taruna memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pemuda, terutama dalam menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dan bermanfaat.

Melalui serangkaian programnya, Karang Taruna tidak hanya mendukung pengembangan individu, tetapi juga berkontribusi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan demikian, organisasi ini menjadi sarana penting dalam menciptakan pemuda yang aktif, peduli, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna memberikan pengaruh positif terhadap generasi muda, khususnya dalam membangun kepedulian sosial antar sesama serta menciptakan komunikasi yang

harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Karang Taruna membawa banyak manfaat bagi perkembangan generasi muda. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain: (1) menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan pemuda, (2) memperluas wawasan serta keterampilan mereka, (3) mendorong terbentuknya sikap toleran dalam kehidupan sosial yang majemuk, serta (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kolaborasi pemuda dalam kegiatan pembangunan lokal (Meuraksa & Saputra, 2020:13–14). Selain itu, Karang Taruna juga berperan dalam membentuk kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial, baik di kalangan pemuda maupun masyarakat desa secara umum. Kepedulian sosial sendiri dapat dipahami sebagai sikap, dorongan, dan tindakan seseorang yang memiliki niat untuk membantu individu lain yang sedang mengalami kesulitan, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama di lingkungan sosialnya (Prabowo & Yani, 2018:614).

Sikap peduli terhadap sesama dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Kepedulian sosial merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari orang lain dan selalu memerlukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai kepedulian sosial dalam diri setiap orang sejak dini. Crandall dalam Oktaviani dan kolega (2019:117) mengemukakan bahwa terdapat empat komponen utama yang membentuk kepedulian sosial, yaitu: (1) motivasi, (2) pemahaman, (3)

kontribusi, dan (4) empati. Keempat aspek tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Di sisi lain, sikap individualis merupakan kebalikan dari kepedulian sosial. Individualisme ditandai dengan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan atau kondisi orang lain. Meningkatnya pengaruh globalisasi telah memperkuat pola perilaku individualistik, terutama di wilayah perkotaan. Tingginya tingkat individualisme di kota terlihat dari minimnya interaksi antarwarga dan lemahnya rasa kepedulian antaranggota masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan cenderung lebih fokus pada urusan pribadi dibandingkan menjalin hubungan sosial dengan tetangga sekitar (Rahmawati, 2021).

4. Kapasitas Tata Kelola

Kapasitas adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno2002), penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk: 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan

manajemen, keuangan dan budaya; 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Penguatan kapasitas adalah upaya penguatan penguatan sebuah komunitas yang bertolak dari kekayaan tata nilai dan kebutuhan prioritas mereka dan mengorganisasikan mereka untuk melakukan sendiri (Gartika, 2017). Penguatan kapasitas kelembagaan berkaitan erat dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building (Rintjap et al., 2018). Penguatan kapasitas berperan sebagai alat/instrumen yang mendukung penggunaan potensi dan kapasitas yang ada secara efisien, memperluas kondisi potensi yang ada dan juga dapat membangkitkan potensi-potensi baru. Pada prinsipnya penguatan kapasitas organisasi meliputi tiga dimensi, yakni: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan (Haryono, 2017).

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan organisasi yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan dapat menggerakkan pihak-pihak yang terlibat pengembangan organisasi, baik itu pengurus yang ada maupun masyarakat setempat. Selain itu pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sehingga sistem organisasi dapat dijalankan secara optimal. Penguatan kapasitas kelembagaan dapat diartikan sebagai usaha membangun

organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati agar penguatan kapasitas dapat membawa hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif (Haris Faozan, 2006:34).

G. Metode Penilitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016:15), merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk triangulasi, dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif.

Menurut Usman (2009:129–130), penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penafsiran atas suatu fenomena secara sistematis. Dalam hal ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman secara mendalam terhadap perspektif para informan. Tahapan analisis yang dilakukan mencakup penafsiran terhadap pernyataan informan, penelusuran konteks atau latar belakang yang melatarinya, serta

kegiatan reduksi data, penarikan kesimpulan, hingga proses verifikasi atas temuan yang diperoleh.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data empiris.

2. Unit Analisis Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sekumpulan hal yang menjadi fokus kajian, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, maupun benda. Menurut Sugiyono (2014:20), objek penelitian adalah atribut, karakteristik, simbol, atau nilai tertentu dari seseorang, objek, atau aktivitas yang memiliki variasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dianalisis, serta diambil kesimpulannya.

Objek penelitian merupakan elemen yang menjadi sasaran utama dalam sebuah kajian ilmiah, baik berupa individu, kelompok, lembaga, maupun benda. Menurut Sugiyono (2014:20), objek penelitian dapat dipahami sebagai atribut, simbol, karakteristik, atau nilai-nilai tertentu dari seseorang, benda, atau kegiatan yang memiliki variasi dan ditentukan oleh peneliti untuk diamati, dianalisis, serta dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.

Berikut ini, objek penelitian yang dimaksud adalah: Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam Peningkatan Kapasitas Tata kelola Karang Taruna.

b. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2006:145) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan subjek yang akan dituju oleh peneliti untuk diteliti menggunakan Teknik Purposive sampling ini merupakan Teknik dalam pengumpulan sampel atau sumber data yang akan dipertimbangkan tertentu yang memiliki ciri-ciri tersendiri sesuai tujuan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2016:218). Dengan tujuan peneliti memilih subjek penelitian untuk mempelajari ataupun memahami sebuah problem pokok yang akan diteliti.

Berikut ini adalah subjek atau informasi yang didapatkan oleh peneliti saat ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Slamet Riyanto	Lurah
2.	Ruswanto	Ketua Bpkal
3.	Adam Nurcahyo	Ketua Karang Taruna
4.	Widi Astuti	Kamituwo
5.	Amarhanif	Ketua 2 Karang Taruna
6.	Nur Fauzi	Ketua 3 Karang Taruna
7.	Muhtar Sari	Anggota Karang Taruna
8.	Hermawan	Wakil Ketua Bpkal
9.	Wajiono	Dukuh
10.	Yulia Fatmawati	Carik

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengertian metode observasi merupakan pengumpulan data yang dapat mengumpulkan secara kompleks kerena keterlibatan dari berbagai faktor pelaksana. Menurut Sugiyono (2017, 203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain karena observasi melihat secara langsung di lapangan berdasarkan kondisi lingkungan.

Dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Dengan cara langsung mengamati suatu objek penelitian tanpa menggunakan panduan observasi yang spesifik. Dengan demikian peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan keadaan yang terjadi dilapangan, (Bungin 2007:144). Dalam menjalankan penelitian, Peneliti melakukan observasi di kalurahan Triwidadi dan mewawancarai pemerintah kalurahan dengan karang taruna serta Bpkal yang berkaitan dengan pemerintah kalurahan Triwidadi dalam peningkatan kapasitas tata Kelola karang Taruna.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui kegiatan tanya jawab antara peneliti dan informan yang terlibat dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2009), wawancara adalah interaksi

antara dua individu yang saling bertukar gagasan dan informasi melalui pertanyaan serta tanggapan, sehingga tercipta komunikasi bermakna mengenai suatu topik tertentu. Sementara itu, Arikunto (1998:146) menyatakan bahwa wawancara adalah proses dialog antara dua pihak pewawancara dan orang yang diwawancarai yang bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai dengan prosedur penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan narasumber untuk menggali informasi yang jelas dan mendalam mengenai pemerintah kalurahan triwidadi dalam peningkatan kapasitas tata kelola karang taruna.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk mengadakan dokumentasi sebagai bukti yang akurat dari berbagai sumber-sumber informasi yang di peroleh dari lapangan. Menurut Sogiyono (2015: 329).

Menurut Lexy J. Moleong (2005:216) menyampaikan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara yang dipakai dalam pengumpulan data yang berdasarkan sumber-sumber tertulis (dokumen), atau rekaman (record) yang di daerah penelitian. Rekaman dipakai untuk memperkuat setiap pertanyaan yang disusun oleh peneliti, baik individu ataupun Lembaga, guna untuk memperoleh sebuah data dan informasi yang akurat. Dokumentasi adalah salah Langkah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk

buku,arsip,dokumen tulisan angka berupa keterangan serta laporan yang didokumen yang maksud dalam ini yaitu seperti dokumen-dokumen profil pemerintah desa dan karang taruna serta dokumen lainya yeng mendukung penelitian terkait topik permasalahan untuk mendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif,yang dimana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah di kumpulkan. Noeng Muahadjir (Rijali,2018 mengatakan bahwa analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyususn hasil observasi yang telah tercatat secara sistematis.

Data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan hasil dokumentasi/studi dokumen dilokasi penelitian dikumpulakn,disajikan,dan dianalisa.yang dimana proses analisis data meliputi :

a. Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga metode ini digunakan secara terpadu untuk menggali dan memahami situasi sosial atau objek penelitian secara menyeluruh, baik melalui apa yang diamati, didengar, maupun yang dicatat atau direkam oleh peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman yang dapat memilih hal-hal pokok atau memfokuskan pada tujuan penelitian yang terpenting dan dapat mencari tema dan pola-polanya. Reduksi data merupakan sebuah proses berfikir sensusif yang akan memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalam wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2017: 137).

Reduksi merupakan sebuah proses peyederhanaan,yang merangkum,dan memfokuskan data mentah yang didapat dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur.dengan tujuan untuk menyoroti hal-hal yang lebih relevan dan berkesinambungan secara erat dengan substansi skripsi.Tahap ini melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap temuan dilapangan melalui observasi,dokumentasi,dan wawancara.oleh karena itu,data dipilih untuk dimasukan dalam penelitian ini adalah data yang secara signifikan mendukung focus utama objek penelitian.sebagai hasil dari proses reduksi,diharapkan dapat memperjelas representasi dan penyajian hasil penelitian dengan cara lebih menyeluruh.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang akan yang dapat memberikan kemungkinan bahwa adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. disusun secara terpadu dan mudah dipahami, kemudian memberikan kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan.

Langkah penyajian data ini dilakukan melalui tahap proses reduksi dalam bentuk narasi teks yang disampaikan secara lebih ringkas, terstruktur, dan jelas, agar mudah dipahami. Dalam tahap penyajian data, peneliti mengamati dinamika yang terjadi dilapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan. Pada tahap proses ini mencakup seleksi data mentah yang belum terolah, yang dilakukan secara berlanjut selama penelitian. Setelah membedakan data, peneliti menyajikan informasi dalam bentuk narasi deskriptif yang terarah dalam bentuk paragraph untuk mempermudah pembaca memahami dan membandingkan data, bagan untuk mengambarkan sebuah pola atau hubungan antar variabel serta gambar untuk memperjelas dan menyampaikan hasil yang telah dikumpulkan selama studi.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui tahapan analisis data yang disusun secara logis dan sistematis. Proses ini mencakup pengolahan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan keterkaitan, pola, serta makna yang muncul dari data tersebut. Penarikan kesimpulan menjadi langkah akhir dari proses analisis, di mana peneliti menyusun hasil temuan utama sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahapan ini tidak hanya bertujuan untuk merangkum temuan penelitian, tetapi juga merefleksikan hasil sintesis dari pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diamati secara langsung di lapangan. Penyusunan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, khususnya yang berkaitan dengan Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam peningkatan kapasitas tata kelola Karang Taruna. Selain menjawab rumusan masalah, kesimpulan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah teoritis maupun praktis, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan serta penerapan di tingkat lapangan.

BAB II

TATA KELOLA KARANG TARUNA KALURAHAN TRIWIDADI

A. Kondisi Kalurahan

Triwidadi adalah salah satu kalurahan di kapanewon Pajangan, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Berdiri pada tanggal 19 Oktober 1946, sekitar satu tahun setelah Kemerdekaan Republik Indnesia. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII memberikan maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang berisi pernyataan bahwa wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembanganya juga dilakukan penetaan Organisasi Pemerintahan Daerah Yogyakarta sampai ditingkat kalurahan Pembentukan Dewan Kalurahan dan Penggabungan Kalurahan.

Kalurahan Triwidadi merupakan penggabungan Tiga Kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Kersan, Trucuk dan Sokodadi. Berikut Kalurahan Kersan terdiri dari 11 padukuhan, Kalurahan Trucuk terdiri dari 5 padukuhan, dan Kalurahan Sokodado terdiri dari 6 padukuhan. Melalui musyawarah para tokoh pada masa itu dengan berbagai pertimbangan maka terpilihlah Bapak Harjo Soetomo yang disebut sebagai Lurah di Kalurahan Triwidadi dan selanjutnya dilakukan pemilihan aparatur Kalurahan seperti Carik, Jogoboyo, Kemakmuran, Kamituwo, dan lain

sebagainya. Pada tahun 1946 s/d 1988 Bapak Harjo Soetomo menjabat sebagai Lurah Kalurahan Triwidadi. Selanjutnya Kalurahan Triwidadi melaksanakan pemilihan kepala Desa pertama kali diikuti oleh 8 (delapan) calon kepala Desa dan yang terpilih Bapak Mardiono masa jabatan Tahun 1990 s/d 1998 dan terpilih lagi pada Tahun 1999 s/d 2008. Pada pemilihan kepala Desa berikutnya yang terpilih Bapak Slamet Riyanto menjabat Tahun 2008 s/d 2014 dan Kembali terpilih Tahun 2014 s/d 2020. Dilaksanakan pemilihan Lurah Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan ayat (2) kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam pelaksanaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah serta Peraturan Bupati Bantul No. 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul No. 4 Tahun 2020 Tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020. Maka pada pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020 Slamet Riyanto calon Lurah Triwidadi terpilih untuk masa jabatan Lurah 2021 s/d 2026.

Tabel 2. 1 Nama-Nama Lurah Sesudah Berdirinya Kalurahan Triwidadi

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1946 s/d 1989	Harjo Sutomo	Seumur Hidup
2	1989 s/d 1997	Mardiyono	Jabatan 8 Tahun
3	1997 s/d 1998	Sugito Ba	PJS
4	1999 s/d 2008	Mardiyono	Perpanjangan 1 th.
5	2008 s/d 2014	Slamet Riyanto	Jabatan 6 Tahun
6	2014 s/d 2020	Slamet Riyanto	Jabatan 6 Tahun
7	2021 s/d sekarang	Slamet Riyanto	Jabatan 8 tahun karena perpanjangan jabatan 2 tahun

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Kalurahan Triwidadi pada tahun 1946 sampai sekarang dilaksanakan 6 kali pemilihan kepala Desa/Lurah dan secara personal ada empat orang yang menjabat kepala Desa/Lurah.

Kalurahan Triwidadi merupakan satu dari tiga Kalurahan yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Kalurahan Triwidadi berdasarkan keadaanya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok,

daerah datar sebesar 20% dan daerah perbukitan 80%. Pada daerah perbukitan, memiliki tebing-tebing yang sangat curam dengan kemiringan 30-80o di beberapa padukuhan (Pemerintah Kalurahan Triwidadi, 2021).

Kalurahan Triwidadi terdiri dari 22 padukuhan yaitu:

- 1) Padukuhan Guwo
- 2) Padukuhan Joganandan
- 3) Padukuhan Jojoran Wetan
- 4) Padukuhan Jojoran Kulon
- 5) Padukuhan Jambean
- 6) Padukuhan Kayuhan Wetan
- 7) Padukuhan Kayuhan Kulon
- 8) Padukuhan Nanggul
- 9) Padukuhan Kersan
- 10) Padukuhan Plambongan
- 11) Padukuhan Sabrang Kidul
- 12) Padukuhan Sabrang Lor
- 13) Padukuhan Trucuk
- 14) Padukuhan Polaman
- 15) Padukuhan Gampeng
- 16) Padukuhan Butuh Kidul
- 17) Padukuhan Butuh Lor
- 18) Padukuhan Pajangan
- 19) Padukuhan Blabak

- 20) Padukuhan Kadiresa
- 21) Padukuhan Kalisoko
- 22) Padukuhan Ngincep

B. Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah

- a) Luas wilayah Kalurahan Triwidadi 1111.9675 Ha
- b) Tata Guna Lahan
 - Pemukiman : ± 33.6 Ha
 - Pertanian : ± 223.7445 Ha
 - Perternakan : ± 6 Ha
 - Perikanan : ± 1 Ha
 - Industri dan Pertokoan : ± 3 Ha
 - Fasilitas Umum/sosial dan Perkantoran: ± 9.6256 Ha
 - Perkebunan dan Hutan Rakyat : ± 916.6866 Ha

2. Batas Wilayah

- Utara : Kalurahan Argorejo & Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu
- Selatan : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
- Timur : Kalurahan Bangunjwo Kapanewon Kasihan
- Barat : Kalurahan Argodado Kapanewon Sedayu

3. Letak Wilayah

Kalurahan Triwidadi berada pada ketinggian 110-300mdpl, dengan suhu 20-30 °C, dengan luas wilayah ± 130 hektar, perbukitan ± 300 hektar, tanah subur 80 hektar, tidak subur ± 56 hektar. Luas wilayah keseluruhan ± 430 hektar.

Jenis tanah di Kalurahan Triwidadi adalah tanah marjinal, yang ditandai dengan struktur tanah yang keras dan pecah-pecah. Lapisan tanah tipis dengan banyak batuan bahan tambang galian atau batu putih, dengan kondisi yang kurang subur (pijiastuti et al, 2018). Dengan kondisi topografi tersebut rasanya tidak memungkinkan apabila masyarakat Kalurahan Triwidadi mengandalkan sektor pertanian pangan dan hortikultura seperti masyarakat perdesahan pada umumnya.

Alam di Kalurahan Triwidadi adalah sebagian besar wilayah perbukitan memiliki tingkat air tanah yang rendah, yang menyebabkan tadih hujan mendominasi. Tingkat erosi tinggi menyebabkan kesuburan tanah menurun, dan ketersediaan air tanah hanya bertahan selama musim hujan dan paling lama empat bulan pada musim kemarau, sehingga sebagian besar wilaya Kalurahan Triwidadi kekeringan. Sumber air yang ada saat ini sangat terbatas, dan sumberair lainnya jau dari permukiman.

Kondisi Alam Kalurahan Triwidadi terdiri dari Perkebunan dan lahan pertanian. Jenis tanaman umumnya dapat tumbuh, dan berbagai

jenis tanaman obat dapat ditemukan di wilayah tertentu. Tanaman pertanian yang tersedia termasuk padi, jagung, kacang tana, kedelai, dan ketela yang juga dikenal sebagai singkong. Sedangkan untuk jenis hewan yang masih ada dan berkembang di Kalurahan Triwidadi burung drekuku, burung pipit, dan jenis satwa lainnya yang masih ada. Meskipun saat ini jenis burung tersebut banyak di buruh, tetapi masih ada di alam liar.

4. Orbitasi

- Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kapanewon Pajangan: 4,00 Km
- Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota Bantul: 19,00 Km
- Jarak Dari Kota/Ibu Kota Kabupaten Bantul: 12,00 Km
- Jarak Dari Ibukota Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 19,00 Km

5. Karakteristik Kalurahan

Kalurahan Triwidadi merupakan kawasan pekalurahan yang bersifat Agraris dengan mata pencaharian masyarakatnya Petani, Peternak, kehutanan dan perkebunan. Sector usaha lain dibidang Home industry serta sebagai buruh.

C. Kondisi Demografi

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kalurahan Triwidadi tahun 2024 berjumlah 10.937 jiwa dan terdiri dari 3.590 KK, dapat diketahui perinciannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	5.434	49,68
2	Perempuan	5.503	50,31
	Jumlah	10.937	100,00

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk kalurahan tercatat sebanyak 10.937 jiwa, yang terdiri dari 5.434 laki-laki dan 5.503 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih 69 jiwa. Komposisi penduduk yang relatif seimbang ini mencerminkan struktur demografis desa yang stabil dan proporsional. Keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan merupakan modal sosial penting dalam pembangunan desa, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, maupun partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selisih yang kecil antara kedua jenis kelamin juga menunjukkan bahwa tidak ada dominasi yang mencolok, sehingga kebijakan pembangunan berbasis gender dapat lebih mudah diterapkan secara adil dan merata. Dengan demikian, data ini dapat menjadi pijakan awal dalam perencanaan program-program pelayanan publik, kesehatan reproduksi, pemberdayaan

perempuan, serta strategi pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivitas.

2. Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2. 3, Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	0-15 Tahun	2.211	20,50
2	16-65 Tahun	7.435	69,00
3	>65 Tahun	1.128	10,50
	Jumlah	10.774	100,00

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa, usia utama: usia anak-anak dan remaja, usia produktif, serta usia lanjut. Penduduk dengan rentang usia 0–15 tahun berjumlah 2.211 jiwa, atau sekitar 20,3% dari total populasi. Kelompok ini merupakan generasi muda yang masih bergantung pada orang tua atau wali, dan membutuhkan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, gizi, dan perlindungan anak. Kelompok usia 16–65 tahun, yang termasuk kategori usia produktif, merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 7.435 jiwa, atau sekitar 68,3% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja dan produktivitas ekonomi, asalkan kelompok ini mendapatkan akses yang memadai terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha.

Sementara itu, kelompok usia di atas 65 tahun tercatat sebanyak 1.128 jiwa, atau sekitar 10,4% dari total penduduk. Jumlah ini menandakan bahwa desa juga memiliki populasi lansia yang cukup

signifikan, yang membutuhkan perhatian dalam layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan dukungan keluarga. Dengan dominasi kelompok usia produktif, desa memiliki potensi demografi yang besar untuk mendorong pembangunan. Namun demikian, potensi ini harus dikelola dengan baik melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok usia.

3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2. 4, Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	105	0,97
2	TNI/polri	32	0,29
3	Swasta	653	6,06
4	Wiraswasta/pedagang	55	0,51
5	Petani	603	5,59
6	Tukang	37	0,34
7	Buruh Tani	1.108	10,28
8	Pensiunan	57	0,52
9	Nelayan	1	0,07
10	Peternak	19	0,17
11	Jasa	125	1,16
12	Pengrajin	196	1,81
13	Pekerja Seni	12	0,11
14	Lainnya	5.853	54,32
15	Tidak Bekerja/pengangguran	1.918	17,80
	Jumlah	10.774	100,00

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan data dari LPPD Tahun 2024, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan mata pencaharian sebanyak 10.774 jiwa. Data ini memberikan gambaran penting tentang struktur ekonomi masyarakat desa dan pola kerja yang berkembang di lingkungan tersebut. Dari keseluruhan data, kelompok terbesar berada pada kategori “Lainnya” sebanyak 5.853 jiwa, yang kemungkinan mencakup berbagai jenis pekerjaan informal, belum terkласifikasi secara spesifik, atau mereka yang memiliki aktivitas di luar kategori pekerjaan formal. Selain itu, terdapat 1.918 jiwa yang tidak bekerja atau pengangguran, yang mencerminkan adanya tantangan dalam ketersediaan lapangan kerja serta perlunya program pemberdayaan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi desa, dengan 1.108 jiwa bekerja sebagai buruh tani, serta 603 jiwa sebagai petani, sehingga total kontribusi sektor pertanian mencapai 1.711 jiwa, atau sekitar 15,9% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada sektor agraris, baik dalam skala kepemilikan lahan sendiri maupun sebagai tenaga kerja harian.

Sementara itu, sektor swasta juga memberikan kontribusi cukup signifikan dengan 653 jiwa, disusul oleh sektor jasa (125 jiwa), pengrajin (196 jiwa), dan wiraswasta/pedagang (55 jiwa), yang menunjukkan adanya keragaman ekonomi dan potensi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun jumlah pegawai negeri (105 jiwa), personel TNI/Polri (32 jiwa), pensiunan (57 jiwa), serta

pekerja seni (12 jiwa) masih tergolong kecil secara persentase terhadap populasi. Profesi nelayan (1 jiwa) dan peternak (19 jiwa) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan peternakan belum berkembang secara luas di desa ini. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada di sektor informal, agraris, dan tidak bekerja, sehingga perlu strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah seperti pelatihan keterampilan kerja, akses ke permodalan usaha, dan perluasan lapangan kerja produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Taman Kanak-Kanak	2.166	18,75
2	Sekolah Dasar/Sederajat	1.203	10,42
3	SMP	2.672	23,14
4	SMU/SMA	2.029	17,57
5	Akademi/D1-D3	156	1,35
6	Sarjana	235	1,03
7	Pascasarjana (S2)	16	0,13
8	Pondok Pesantren	34	0,29
9	Pendidikan Keagamaan	19	0,16
10	Sekolah Luar Biasa	15	0,15
11	Kursus Keterampilan	28	0,24
12	Tidak Lulus	458	5,30
13	Tidak Sekolah	1.743	17,44
	Jumlah	10.774	100,00

Sumber: LPPKal, 2024

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 10.774 jiwa penduduk, tingkat pendidikan masyarakat desa sangat beragam, mulai dari yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali hingga jenjang pascasarjana. Kelompok terbesar berasal dari lulusan SMP sebanyak 2.672 jiwa, disusul oleh lulusan SMA/SMU sebanyak 2.029 jiwa dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2.166 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengakses pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan modal penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, terdapat pula jumlah yang signifikan belum mengenyam pendidikan formal, yakni sebanyak 1.743 jiwa yang tidak sekolah dan 458 jiwa yang tidak lulus sekolah. Jika digabungkan, ini berarti sekitar 2.201 jiwa (lebih dari 20%) dari total populasi belum menyelesaikan pendidikan dasar, yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran literasi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi seperti Akademi/D1-D3 sebanyak 156 jiwa, Sarjana sebanyak 235 jiwa, dan Pascasarjana (S2) sebanyak 16 jiwa, masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Ini menunjukkan bahwa akses dan minat terhadap pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Selain jalur pendidikan formal, masyarakat juga mengakses pendidikan non-formal seperti pondok pesantren (34 jiwa), pendidikan keagamaan (19 jiwa), kursus keterampilan (28

jiwa), dan sekolah luar biasa (15 jiwa), yang menunjukkan adanya keberagaman jalur pendidikan sesuai kebutuhan dan latar belakang masyarakat.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Kehidupan masyarakat di Kalurahan Triwidadi umumnya cukup terorganisir. Ada banyak kelompok sosial di Kalurahan Triwidadi baik di tingkat padukuhan dan Kalurahan. Di Kalurahan Triwidadi, ada banyak kelompok sosial, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, RT, Dasa Wisma, Kelompok Arisan/simpan pinjam, Kelopok Jimpit, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan Kelompok Gotong-Royong. Kegiatan sosial, seperti budaya gotong royong, berlangsung dengan baik di seluruh padukuhan Kalurahan Triwidadi meskipun tidak diatur secara formal.

2. Ekonomi

Kalurahan Triwidadi masih bergantung pada pertanian dan bisnis. Ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang berkerja di dua sektor tersebut. Semua padukuhan di Kalurahan Triwidadi masih berfokus pada pertanian, dengan penduduk bekerja sebagai petani dan sebagai buruh tani. Pertanian terdiri dari tanaman seperti padi dan polowijo. Sektor bisnis yang ada termasuk kerajinan, peternak ayam, bebek, sapi, kambing, perikanan, industry rumah tangga, dan jasa seperti

bengkel, photocopy, rental, dan fotografer. Problem peningkatan ekonomi rakyat sangat rumit, tetapi saat ini kondisi ekonomi rakyat di Kalurahan Triwidadi mulai bangkit dan membaik. Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah lainnya yang juga membantu meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat melalui program yang tepat.

3. Sarana dan Prasarana, Pemukiman serta Infrastruktur Umum

a) Perumahan

Kondisi kelas atas Kalurahan Triwidadi mampu membangun rumah untuk satu keluarga, meskipun bentuk dan jenis bangunan bervariasi tergantung pada tingkat keuangan, ada yang permanen dan ada yang semi permanen. Sebagian besar penduduk Kalurahan Triwidadi tinggal dalam satu rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga, karena orang tua yang suda lanjut usia tinggal Bersama keluarga anaknya atau sebaliknya keluarga anak tinggal mengindung di rumah orang tua mereka. Kondisi pemukiman di Kalurahan Triwidadi hamper sepenunya layak dihuni dan memenuhi persyaratan konstruksi bangunan tempat tinggal. Namun, karena kondisi ekonomi tetap berada di garis kemiskinan, beberapa keluarga masih tinggal di rumah tinggal yang tidak layak huni.

b) Jalan

Jalan nasional lintas tengah (jl. wates) dan jalan nasional lintas Selatan (jl. srandakan) menhubungkan Kalurahan Triwidadi dengan beberapa jalan kabupaten. Jalan-jalan ini menhubungkan wilaya-wilaya di dalam desa dengan wilaya Kalurahan atau Kapanewon yang berbatasan dengannya. Jalan-jalan di Kalurahan Triwidadi umumnya dalam kondisi baik, dengan jalan lingkungan di padukuhan di bangun dengan aspal dan korblok. Walaupun beberapa jalan sudah rusak, terutama di daerah perbukitan, karena kontur tanah yang tidak rata dan kurangnya perawatan, namun kondisinya masih layak untuk perjalanan warga.

c) Jalan Drainase

Di Kalurahan Triwidadi, banyak jaringan drainase yang tidak memadai atau bahkan belum dibangun. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, akan terjadi genangan air yang akan memakan waktu lama untuk meresap dan kering. Jikapun ada saluran drainase, itulah hanya saluran kecil yang tidak diatur dan tidak dirawat.

d) Jaringan Listrik

Jaringan Listrik di Kalurahan Triwidadi hamper memenuhi seluruh wilayah melalui jaringan PLN, yang telah mencapai wilayah padukuhan. Jadi, semua orang menggunakan Listrik

untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga, dan kegiatan produktif.

e) Fasilitas Olahraga

Tabel 2. 6 Jumlah Sarana Olahraga

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Bola Voli	18
2	Lapangan Bulu Tangkis	5
3	Lapangan Sepak Bola	1
4	Lapangan Tenis Meja	7

Sumber: LPPKal, 2024

Menurut tabel 2.6, sarana prasarana umum yang digunakan oleh masyarakat Triwidadi sangat memadai dan dalam kondisi baik.

f) Fasilitas Pendidikan

Di Kalurahan Triwidadi, ada fasilitas pendidikan dari PAUD hingga sekolah menengah atas, serta pendidikan non formal. Ada juga panti asuhan dan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas.

Tabel 2. 7 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	11
2	TK	8
3	SD	5
4	SLTP	1
5	PKMB	1
6	SMK	1
7	Perpustakaan Desa	1

Sumber: LPPKal, 2024

g) Fasilitas Kesehatan

Tabel 2. 8 Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	-
2	Puskesdes	1
3	UKBM (Posyandu/Polindes)	22

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, data LPPD Tahun 2024 terdapat tiga jenis fasilitas kesehatan yang tercatat di desa, dengan total (23) unit fasilitas kesehatan. Dari ketiga jenis tersebut, Puskesmas tidak tersedia di desa ini, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan tingkat dasar belum sepenuhnya terfasilitasi oleh lembaga resmi milik pemerintah di tingkat kecamatan. Ketiadaan Puskesmas menjadi catatan penting dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang lebih komprehensif, seperti pemeriksaan dokter umum, imunisasi lengkap, dan penanganan penyakit menular.

Namun demikian, desa telah memiliki (1) unit Puskesdes (Puskesmas Desa) yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan sederhana, biasanya dikelola oleh bidan desa atau tenaga medis terbatas. Meskipun cakupannya tidak seluas Puskesmas, keberadaan Puskesdes cukup penting dalam

memberikan layanan kesehatan dasar seperti pertolongan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan anak. Yang paling dominan adalah keberadaan 22 unit UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Posyandu dan Polindes, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warganya. Posyandu sangat vital dalam layanan preventif, seperti imunisasi balita, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyuluhan gizi dan kesehatan ibu-anak.

h) Fasilitas Peribadahan

Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Peribadahan

No	Jenis Fasilitas Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	29
2	Mushola	21
3	Gereja	1

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan data LPPD tahun 2024, desa ini memiliki total 51 unit fasilitas peribadahan, yang terdiri atas 29 masjid, 21 mushola, dan 1 gereja. Dominasi jumlah masjid dan mushola menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa beragama Islam, yang juga selaras dengan data sebelumnya mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama. Keberadaan 31 masjid menggambarkan bahwa kegiatan ibadah berjamaah seperti salat Jumat, pengajian,

dan kegiatan keagamaan lainnya dapat terfasilitasi dengan baik di berbagai dusun atau lingkungan dalam desa.

Sementara itu, 21 mushola berfungsi sebagai tempat ibadah harian yang biasanya digunakan untuk salat lima waktu, pengajian rutin, serta kegiatan keagamaan skala kecil. Keberadaan mushola juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dekat terhadap sarana ibadah, yang menjadi indikator kuatnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial desa. Selain itu, terdapat 1 gereja yang menunjukkan keberadaan minoritas umat Kristen di desa ini. Meskipun jumlahnya tidak besar, keberadaan fasilitas ibadah tersebut mencerminkan bahwa desa tetap memberi ruang bagi keragaman keyakinan dan toleransi antarumat beragama.

i) Fasilitas Perdagangan Dan Ekonomi

Fasilitas perekonomian dan perdagangan yang ada di Kalurahan Triwidadi antara lain adalah pasar desa “sudimoro”, tokoh, kios, tempat wisata dan lain-lain yang ada di wilayah Triwidadi sebagai sarana perekonomian dan perdagangan.

j) Penyelenggaraan Air Bersih, Sanitasi Dan Persampahan

Untuk penduduk Kalurahan Triwidadi menggunakan sumur-sumur disekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka setiap hari. Sehingga, Ketika musim kemarau memasuki, wilayah perbukitan sering mengalami kesulitas karena debit sumur

air berkurang atau bahkan menjadi kering. Karena infrastruktur yang masih terbatas, layanan air bersih PDAM belum dapat mencapai seluruh wilayah Triwidadi.

Jaringan sanitasi juga masih sederhana, tetapi sudah mengikuti dan memenuhi peraturan serta standar Pembangunan sanitasi yang direkomendasikan pemerintah. Selain itu pengelolahan sampah dan limbah rumah tangga masih sangat sederhana dan terlihat seperti hanya membuang sampah melalui lubang galian tana.

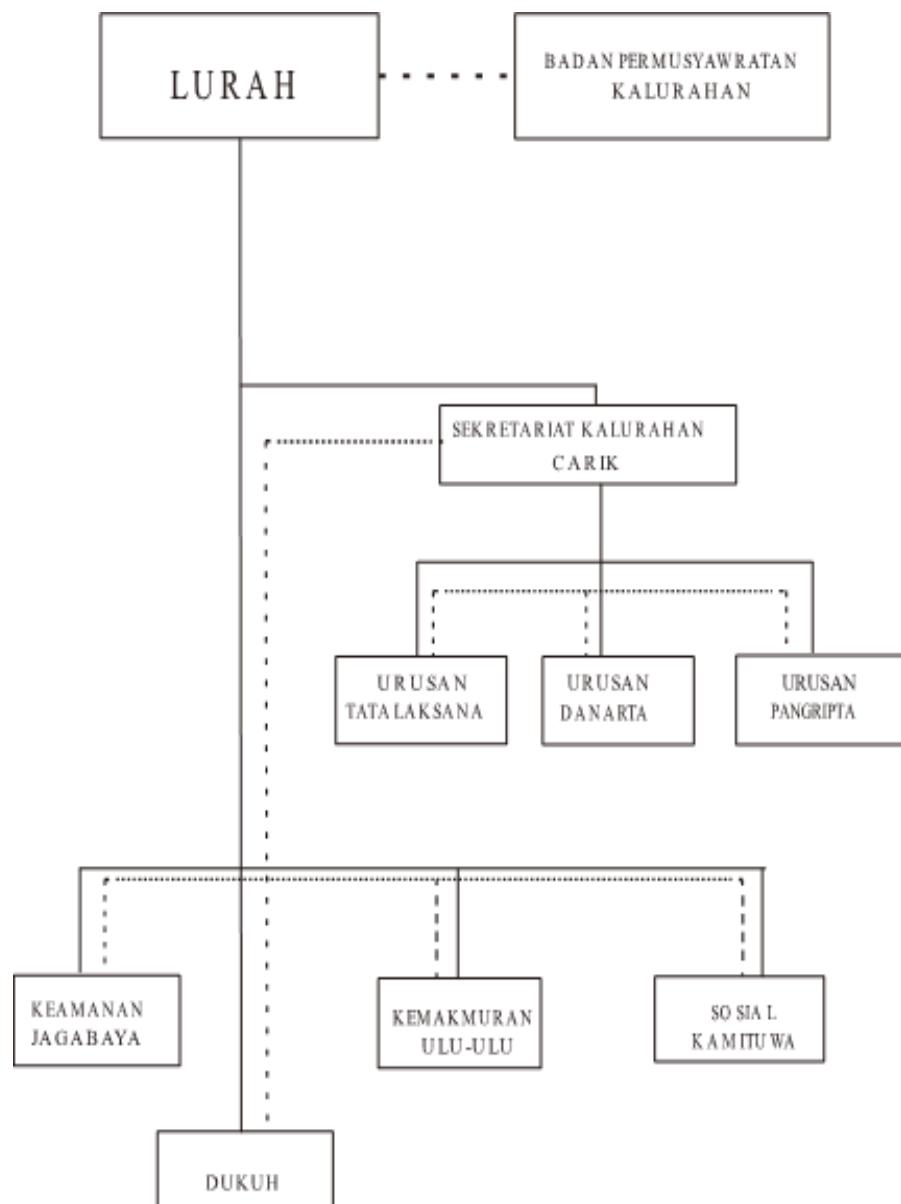
k) Ruang Terbuka Hijau

Karena sebagian tanah desa digunakan untuk pertanian, wilayah Kalurahan Triwidadi belum memiliki infrastruktur ruang terbuka hijau. Saat ini, ruang terbuka hijau dapat digunakan sebagai lapangan olaraga atau tanah lapang yang dapat digunakan untuk kegiatan olaraga dan aktivitas umum lainnya. Jadi, secara tidak langsung peruntukannya juga terganggu, dan itu tidak dapat dianggap sebagai ruang terbuka hijau.

E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 134 tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Susunan Personalia Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan



*Sumber: Laporan Penyeleenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal)
Tahun 2024*

Tabel 2.2 Susunan Pamong Kalurahan Triwidadi

No	Nama	Jabatan	Umur	Masa Jabatan
1	Slamet Riyanto	Lurah	47 Tahun	s/d 2028
2	Anita Yulia F, A.Md.KL	Carik	34 Tahun	s/d 2051
3	Giyanti, S.Pd	Kasi Jagabaya	54 Tahun	s/d 2031
4	Mulyadi	Kasi Ulu-ulu	54 Tahun	s/d 2031
5	Widi Astuti	Kasi Kamituwa	50 Tahun	s/d 2035
6	Sarwedi	Kaur Pangripta	57 Tahun	s/d 2028
7	Leli Yuliat, S.E	Kaur Danarta	41 Tahun	s/d 2044
8	Muhlis Huda Subekti	Kaur Tata Laksana	35 Tahun	s/d 2050

Sumber: LPPKal, 2024

Tabel 2.3 Susunan Padukuhan Kalurahan Triwidadi

No	Nama	Jabatan	Umur	Masa jabatan
1	Mukiyo	Dukuh Guwo	60 Tahun	s/d 2025
2	Endung Dasuki	Dukuh Blabak	47 Tahun	s/d 2038
3	Waluyo	Dukuh Gampeng	46 Tahun	s/d 2039
4	Wakimin	Dukuh Nanggul	55 Tahun	s/d 2030
5	Giyono	Dukuh Kersan	42 Tahun	s/d 2043
6	Tumiyo	Dukuh Jojoran Wetan	52 Tahun	s/d 2033
7	Marjiman	Dukuh Jojoran Kulon	42 Tahun	s/d 2043
8	Sapardi	Dukuh Sabrang Lor	59 Tahun	s/d 2026
9	Pardi	Dukuh Sabrang Kidul	57 Tahun	s/d 2028
10	Suyadi	Dukuh Kadireso	59 Tahun	s/d 2026
11	Sudadi	Dukuh Kayuhan Kulon	60 Tahun	s/d 2025
12	Wajiyana	Dukuh Kayuhan Wetan	53 Tahun	s/d 2032
13	Budiyanto	Dukuh Pajangan	59 Tahun	s/d 2026
14	Warsiyo	Dukuh Butuh Lor	60 Tahun	s/d 2025
15	Tri Handayani	Dukuh Butuh Kidul	41 Tahun	s/d 2044
16	Sutarjan, A.Md.	Dukuh Polaman	56 Tahun	s/d 2029
17	Hendi	Dukuh Jambean	37 Tahun	s/d 2048
18	Dwi Janari	Dukuh Trucuk	30 Tahun	s/d 2055
19	Subiyana (Pj)	Dukuh Joganandan	52 Tahun	s/d 2025
20	Subiyana	Dukuh Ngincep	52 Tahun	s/d 2033
21	Siyem	Dukuh Kalisoko	59 Tahun	s/d 2026
22	Trudiyanto	Dukuh Plambongan	43 Tahun	s/d 2042

Sumber: LPPKal, 2024

F. Sejarah Dan Latar Belakang Karang Taruna Asung Bahkti

Karang Taruna Asung Bahkti berdiri sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan akan wadah yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi serta potensi generasi muda di Kalurahan Triwidadi.karang Asung Bahkti merupakan organisasi sosial kepemudaan berbasis Desa yang didirikan untuk mewadahi kegiatan positif pemuda sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah Kalurahan dalam membangun.

Nama “Asung Bahkti” sendiri mencerminkan semangat pengabdian pemuda kepada Desa dan masyarakat.Karang Taruna ini lahir atas dasar kolektif sekelompok pemuda yang memiliki satu visi,yakni “Triwidadi satu” yaitu mewujudkan persatuan dan pembangunan Desa melalui sinergi anatar elemen pemuda.Dengan semangat ini,Karang Taruna Asung Bahkti aktif berkelaborasi dengan berbagai pihak seperti komunitas kepemudaan lokal,perangkat Desa,hingga dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten.

Gambar 1.2 Struktur Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi



Berdasarkan struktur kepengurusan organisasi Karang Taruna di atas dapat diketahui bahwa Karang Taruna Asung Bahkti Kalurahan Triwidadi dirancang secara sistematis dan berjenjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan secara efektif. Struktur ini mencerminkan pembagian tanggung jawab yang jelas, koordinasi antar divisi, serta adanya pembagian fungsi administratif dan operasional dalam organisasi. Pada tingkat tertinggi, terdapat Ketua Umum yang membawahi seluruh kegiatan dan kebijakan strategis Karang Taruna. Di bawahnya terdapat sekretariat, bendahara, dan tiga ketua bidang, masing-masing membawahi divisi-divisi teknis sesuai bidang kerja.

VISI

Mewadahi kegiatan warga Karang Taruna Triwidadi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi para pemuda, guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Triwidadi dengan asas kebersamaan dan persaudaraan

MISI

1. Mewujudkan organisasi yang akuntabel dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab, berakhlaq dan berbudaya.
2. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial di lingkungan Kalurahan Triwidadi.
3. Terwujudnya organisasi kepemudaan yang mandiri dengan mengembangkan Unit Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna.
4. Meningkatkan peran pemuda dalam pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka kemitraan.
5. Ikut serta melestarikan adat budaya yang ada di Kalurahan Triwidadi.
6. Turut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan minat dan bakat dalam bidang olahraga.

Berdasarkan visi misi di atas dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna Triwidadi merupakan organisasi kepemudaan yang bertujuan menjadi wadah pengembangan kreativitas, inovasi, dan potensi para pemuda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Triwidadi. Melalui prinsip kebersamaan dan persaudaraan, organisasi ini berkomitmen membangun sumber daya manusia yang berintegritas, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, menjalin kemitraan, serta melestarikan budaya dan meningkatkan prestasi di

bidang olahraga. Dengan visi yang kuat dan misi yang terarah, Karang Taruna Triwidadi berperan aktif dalam menciptakan pemuda yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA KARANG TARUNA

Pada bab ini, peneliti akan membahas dan menganalisi secara khusus terkait Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Karang Taruna. Pengembangan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna merupakan salah satu aspek penting dalam membangun sumber daya manusia dan memperkuat peran pemuda dalam pembangunan desa. Di Kalurahan Triwidadi, Pemerintah kalurahan sangat vital dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna agar dapat berfungsi secara optimal sebagai wadah pemberdayaan pemuda dan penggerak pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Kalurahan Triwidadi berperan aktif dalam memberikan fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengurus Karang Taruna. Melalui program-program peningkatan kapasitas, pemerintah kalurahan membantu Karang Taruna dalam membangun manajemen organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar Karang Taruna mampu menyusun program kerja yang terstruktur, mengelola sumber daya secara efektif, serta melaksanakan kegiatan yang berdampak positif bagi Masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Karang Taruna dalam menjalankan

aktivitasnya, seperti ruang pertemuan, alat kebersihan, dan fasilitas olahraga.

Pemerintah desa mendorong Karang Taruna untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, mulai dari pengelolaan lingkungan, sosial budaya, hingga kewirausahaan pemuda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk memberdayakan seluruh potensi masyarakat, termasuk pemuda sebagai generasi penerus. Dengan meningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna, Pemerintah Kalurahan Triwidadi berharap organisasi ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Pemerintah kalurahan juga mendorong Karang Taruna untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah lain, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jaringan, meningkatkan sumber daya, dan memperkuat peran Karang Taruna dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan kapasitas tata kelola Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi sangat strategis. Melalui pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan yang berkelanjutan, Karang Taruna diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pemuda, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

A. Penyajian Data dan Analisis

1. Peningkatan Kemampuan Individu Dalam Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap

Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki peran strategis dalam peningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat lokal. Salah satu bentuk peran tersebut adalah memberikan pembinaan langsung kepada pengurus Karang Taruna melalui arahan kebijakan, pelatihan manajemen organisasi, serta pendampingan dalam perencanaan program kerja. Selain itu, pemerintah desa juga mendukung kegiatan Karang Taruna dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa dan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan, seperti tempat pelatihan dan sarana kegiatan sosial. Tidak hanya itu, pemerintah desa turut mendorong keterlibatan aktif Karang Taruna dalam berbagai program pembangunan desa, seperti kerja bakti, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan ini, Karang Taruna diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaannya, menjalankan program secara profesional, serta menjadi motor penggerak dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwiwdadi diketahui Bahwa:

“kami sudah selalu melibatkan karang taruna dalam hal pembangunan mas, seperti kegiatan sosial kemasyarakat, kemudian kami juga fasilitasi setiap kegiatan karang taruna dengan menggunakan fasilitas kaluhaar dan selain dari itu kami juga melibatkan peran dari karang taruna dalam

kegiatan kegiatan pelaksanaan kegiatan kalurahan termasuk ketika ada even even kalurahan seperti kegiatan sosial kegiatan budaya, kemasyarakatan" (Wawancara 28/04/2025)

Dari pernyataan Bapak Slamet Riyanto dapat disimpulkan bahwa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam memberdayakan karang taruna sebagai mitra strategis membangun pembangunan desa. Karang taruna tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam event budaya dan program pembangunan lainnya, menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami penting peran pemuda sebagai penggerak kemajuan. Yang penting untuk menciptakan Pembangunan desa yang partisipatif dan inklusif. Fasilitasi dukungan yang diberikan pemerintah turut meningkatkan motivasi dan kapasitas karang taruna, sehingga mereka dapat berkontribusi secara nyata. Meski demikian, tantangan seperti menjaga partisipasi anggota dan keberlanjutan program perlu di antisipasi melalui pembinaan dan pelatihan keberlanjutan. Secara keseluruhan, pelibatan karang taruna di Triwidadi merupakan contoh praktik baik pembangunan Kalurahan yang terus diperkuat, akan membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat dan mendorong terwujudnya Kalurahan yang maju dan mandiri.

Berdasarkan pernyataan di atas maka akan dijelaskan lagi oleh Bapak Ruswanto selaku Ketua Badan Permusyaratatan Kalurahan (Bpkal) Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

” Saat ini Karang Taruna Kalurahan dipimpin oleh Mas Adam Nurcahyo dan sedang menyelenggarakan kegiatan PORKAL, yakni kompetisi antar padukuhan di berbagai cabang olahraga. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Karang Taruna yang dibina oleh Lurah, dengan

pengawasan dari Bamuskal. Bamuskal bertugas memantau pelaksanaan program kalurahan, termasuk penggunaan dana Rp50 juta per padukuhan yang dialokasikan untuk bidang kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan lainnya. Dana ini juga digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana masyarakat, yang pelaksanaannya langsung diawasi oleh Bamuskal. Dalam hal pengelolaan BUMKal atau BUMDes, Lurah bertindak sebagai komisaris dan mengangkat direktur untuk mengelola penyertaan modal dari pemerintah. Bamuskal mengawasi apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai visi dan misi yang disampaikan saat pencalonan Lurah. Permasalahan Karang Taruna: Secara umum tidak ada masalah besar. Namun, dalam beberapa kegiatan seperti pengelolaan parkir, pernah terjadi perselisihan soal pembagian hasil. Masalah seperti ini biasanya diselesaikan secara internal oleh pengurus Karang Taruna dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. (Wawancara 05/05/2025

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Bapak Ruswanto selaku BUMDesa mencerminkan sistem tatakelola desa yang baik, dimana program-program karang taruna berjalan dengan dukungan, pembinaan, dan pengawasan yang jelas dari pemerintah Kalurahan dan bamuskal. Alokasi dana Kalurahan yang transparan serta pengawasan yang ketat memastikan bahwa setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kemampuan karang taruna dalam menyelesaikan masalah secara internal menjadi indikator positif bagi kemandirian dan kedewasaan organisasi kepemudaan di triwidadi. Secara keseluruhan, sinergi antara karang taruna dan bamuskal menjadi kunci terciptanya program-program Kalurahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik ini diharapkan dapat terus diperhatikan dan ditingkatkan demi kemajuan kalurahan triwidadi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan diperkuat oleh Mas Adam Nurcahyo selaku ketua Karang Taruna Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

” Kalurahan cukup membantu karena anggarannya berasal dari sana. Setiap tahun dibuat RAB kegiatan dan laporan bulanan yang jelas. Kalurahan juga sering mengadakan pelatihan dan sosialisasi, seperti anti narkoba. Karang Taruna berusaha mengembangkan anggota dengan dukungan penuh dari kalurahan.”
(Wawancara 28/04/2025)

Gambar 3.1 RAB

Dari hasil wawancara dengan Mas Adam Nurcahyo selaku Ketua Karang Taruna Kalurahan Triwidadi, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Karang Taruna di Kalurahan tersebut tidak hanya bersifat lambang, tetapi telah menjalankan tugas yang substansial dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan pemuda. Karang Taruna Triwidadi menunjukkan kapasitas organisasi yang cukup baik, baik dari sisi manajemen kegiatan, pengelolaan anggaran, maupun dalam menjalin kemitraan strategi dengan pemerintah.

Dukungan dari pemerintah kalurahan menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlangsungan kegiatan Karang Taruna. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan aktif dalam bentuk anggaran, tetapi juga memfasilitasi pelatihan dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi pengembangan kapasitas pemuda. hal ini menunjukkan adanya kepedulian

dan kesadaran dari pemerintah desa akan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Karang Taruna juga menunjukkan inisiatif dan semangat internal yang kuat untuk terus berkembang dan berkontribusi. Mereka tidak pasif menunggu bantuan, tetapi aktif merancang program, membuat laporan pertanggung jawaban, serta melakukan pengembangan kapasitas anggotanya secara berkelanjutan. tata kelola yang baik, ditandai dengan penyusunan rapat anggaran biaya tahunan dan laporan bulanan, menjadi cerminan organisasi yang berpengalaman, akuntabel, dan transparan sesuatu yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Secara lebih luas, Karang Taruna Kalurahan Triwidadi telah membuktikan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, mulai dari isu narkoba hingga kegiatan pelatihan pemuda. Peran ini menempatkan Karang Taruna sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya fokus pada kegiatan hiburan, tetapi juga aktif terlibat dalam pembangunan sosial yang lebih luas. Dengan segala potensi yang dimiliki, Karang Taruna Triwidadi berpeluang besar menjadi contoh bagi Karang Taruna di kalurahan atau desa lainnya. Dukungan dari pemerintah desa, komitmen dari pengurus dan anggota, serta adanya sistem manajemen organisasi yang baik merupakan kombinasi yang baik bagi kemajuan suatu organisasi kepemudaan.

Berdasarkan pernyataan di atas berikut akan di jelaskan juga oleh Ibu Widi Astuti selaku Kamitwo Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Pemerintah kalurahan aktif dalam pemberdayaan dan pelatihan, serta mendukung program seperti persiapan Porkal. Karang taruna terlibat dalam berbagai kegiatan di tingkat kalurahan dan padukuhan, dengan dukungan anggaran dari kalurahan meski tidak penuh, karena ada juga dana swadaya dan donatur. Forum anak dari SMP hingga SMA juga dibina oleh karang taruna sebagai regenerasi.”

(Wawancara 28/04/2025)



Gambar 3.2 Persiapan Porkal

Dari pernyataan Ibu Widi Astuti, menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan pemuda, dan Karang Taruna memanfaatkan dukungan tersebut dengan cukup optimal. Yang dimana meskipun tidak semua kebutuhan anggaran ditanggung pemerintah, namun adanya inisiatif dari karang taruna untuk menggalang donatur dan menggalang swadaya dengan menunjukkan yang dimana hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya kemandirian organisasi. Selain itu aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, di sisi lain upaya pelatihan forum anak juga menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki visi jangka panjang untuk regenerasi kepemimpinan muda. Dengan sinergi antara pemerintah, Karang Taruna, dan masyarakat tersebut, Kalurahan Triwidadi memiliki potensi besar untuk menjadi contoh

keberhasilan pembangunan sosial yang berbasis komunitas ataupun kelompok.

Berdasarkan pernyataan di atas berikut akan di jelaskan lagi oleh Mas Amarhanif selaku ketua 2 Karang Taruna Karang Taruna Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

“Kalurahan sangat berperan penting dalam mendukung Karang Taruna mas melalui pendanaan, materi, dan dukungan semangat. Pemerintah kalurahan juga membina langsung dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, olahraga, serta pengembangan anak, termasuk kolaborasi dengan forum anak. Semua kegiatan didanai kalurahan, meski jika kurang dana mas, kadang Karang Taruna aktif mencari donatur atau sponsor.” (Wawancara 01/05/2025)

Dari pernyataan Mas Amarhanif, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi sangat bergantung pada dukungan menyeluruh dari pemerintah kalurahan, baik dalam hal pendanaan, materi, maupun motivasi. Pemerintah kalurahan tidak hanya sebatas menyediakan dana, tetapi juga aktif membina dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan pengembangan anak yang melibatkan masyarakat luas.

Selain itu, Karang Taruna menunjukkan inisiatif tinggi dengan mencari donatur atau sponsor ketika dana dari pemerintah terbatas, sehingga program-program tetap berjalan lancar. di sisi lain adanya kolaborasi dengan forum anak juga menandakan pendekatan yang inklusif dalam pemberdayaan generasi muda. Serta sinergi antara pemerintah, Karang Taruna, dan forum anak ini mencerminkan model pemberdayaan

masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kalurahan.

Berdasarkan pernyataan di atas berikut akan di jelaskan oleh Mas Nur Fauzi selaku Ketua Karang Taruna 3 Karang Taruna Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Pemerintah kalurahan sangat mendukung Karang Taruna, terutama dalam pembiayaan dan program. Anggaran belanja kalurahan mencakup dana untuk kepemudaan, termasuk kegiatan seperti pengajian, sosialisasi, dan pekan olahraga. Selain itu, kalurahan juga memberikan fasilitas seperti gedung sekretariat, laptop, dan printer, serta selalu melibatkan Karang Taruna dalam kegiatan atau undangan resmi. Komunikasi antara keduanya juga terjalin dengan baik.” (Wawancara 01/05/2025)

Berdasarkan pernyataan Mas Nur Fauzi sebagai Ketua Karang Taruna 3 Kalurahan Triwidadi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kalurahan terhadap Karang Taruna sangat komprehensif dan berkelanjutan yang di mana dukungan ini tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas penunjang serta terjalinnya komunikasi yang efektif antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna. dari sisi pendanaan, pemerintah kalurahan secara konsisten mengalokasikan anggaran khusus dalam belanja kalurahan yang diperuntukkan bagi kepemudaan. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda, seperti pengajian, sosialisasi, dan pekan olahraga. Dengan adanya anggaran yang jelas dan terencana, Karang Taruna dapat menjalankan program-programnya dengan lebih terstruktur dan terarah, sehingga dampak positifnya terhadap masyarakat dapat lebih maksimal. selain

dukungan finansial, pemerintah kalurahan juga menyediakan fasilitas penting seperti gedung sekretariat, laptop, dan printer. Fasilitas ini sangat krusial dalam menunjang aktivitas administratif dan operasional Karang Taruna. dengan sarana yang memadai, Karang Taruna dapat bekerja lebih efektif, mengelola kegiatan dengan baik, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program-program yang mereka jalankan. Secara keseluruhan, dukungan yang menyeluruh dari pemerintah kalurahan ini menjadi fondasi kuat bagi Karang Taruna Kalurahan Triwidadi untuk terus berkembang dan berinovasi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikutnya akan di jelaskan oleh mas Muhtar Sari selaku anggota Karang Taruna Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kalurahan berperan besar dalam mendukung kegiatan Karang Taruna mas, baik dari segi materi, dana, hingga pendampingan langsung. Setiap kegiatan Karang Taruna, termasuk pengadaan Porkal, selalu melibatkan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat.” (Wawancara 05/05/2025)

Dari Pernyataan Mas Muhtar Sari menegaskan bahwa pemerintah kalurahan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi, tidak hanya melalui pemberian materi dan dana, tetapi juga dengan pendampingan langsung selama pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan berperan sebagai mitra aktif, bukan sekadar penyedia sumber daya. Keterlibatan pemerintah dalam setiap kegiatan, termasuk pengadaan Pekan Olahraga Kalurahan (Porkal), mencerminkan kolaborasi yang erat dan sinergis antara

kedua pihak. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah kalurahan bersifat strategis, baik secara administratif maupun dalam pengawasan dan dukungan pelaksanaan program Karang Taruna.

Secara keseluruhan, dukungan materi, dana, dan pendampingan langsung dari pemerintah kalurahan menjadi faktor utama yang memperkuat kapasitas Karang Taruna dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan olahraga. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi pemuda, sehingga berdampak positif pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Bapak Hermawan selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

“Karang Taruna Kalurahan Triwidadi mendapat dukungan dari pemerintah kalurahan mas, baik anggaran maupun kegiatan. Setiap tahun ada pelatihan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan pengelolaan pariwisata, sadar wisata, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Karang Taruna juga rutin dilibatkan dalam berbagai acara seperti pengajian dan hari jadi kalurahan.” (Wawancara 05/05/2025).



Gambar 3.3 Pelatihan Kepemimpinan

Pernyataan Bapak Hermawan menegaskan bahwa Karang Taruna Kalurahan Triwidadi mendapat dukungan konsisten dari pemerintah

kalurahan, baik berupa anggaran maupun pelaksanaan kegiatan. dukungan ini tidak hanya finansial, tetapi juga melalui pelatihan peningkatan kapasitas tahunan di bidang pengelolaan pariwisata, kesadaran wisata, kewirausahaan, dan kepemimpinan, yang bertujuan memperkuat keterampilan anggota Karang Taruna untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.selain itu, Karang Taruna rutin dilibatkan dalam acara penting seperti pengajian dan peringatan hari jadi kalurahan, menunjukkan peran aktif mereka sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. hal ini memperkuat posisi Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan sosial kemasyarakatan.secara keseluruhan, dukungan anggaran, pelatihan kapasitas, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan rutin menjadi fondasi kuat bagi Karang Taruna untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan. Pendekatan ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Bapak Wajiono selaku Dukuh Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Pemerintah kalurahan memantau dan mendukung kegiatan Karang Taruna dengan memfasilitasi pelatihan (seperti las dan potong rambut) serta mengembangkan potensi wilayah. Karang Taruna berkoordinasi dengan kalurahan terkait program yang akan dijalankan, termasuk di bidang olahraga dan peringatan hari besar. Secara struktural, kegiatan Karang Taruna berjalan meski terkadang terkendala oleh pergantian pengurus. Aspirasi dari tiap padukuhan disalurkan untuk program

seperti fasilitas dan sosialisasi baik di tingkat dusun maupun kalurahan.”
(Wawancara 01/05/2025)

Berdasarkan pernyataan Bapak Wajiono menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan secara aktif memantau dan mendukung Karang Taruna dengan memfasilitasi pelatihan praktis seperti las dan potong rambut untuk mengembangkan keterampilan anggota sekaligus potensi wilayah. Dukungan ini juga mencakup koordinasi erat antara Karang Taruna dan pemerintah kalurahan dalam merancang program, terutama di bidang olahraga dan peringatan hari besar.

Meski kegiatan Karang Taruna berjalan baik, pergantian pengurus kadang menjadi tantangan yang mempengaruhi kelancaran program. Namun, aspirasi tiap padukuhan tetap tersalurkan melalui Karang Taruna dalam bentuk fasilitas dan sosialisasi di tingkat dusun maupun kalurahan, menunjukkan mekanisme komunikasi dan partisipasi masyarakat yang efektif secara keseluruhan, peran pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi pelatihan, mendukung koordinasi program, dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kunci keberlangsungan dan efektivitas Karang Taruna.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh hasil Ibu Yulia Fatmawati selaku Carik Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

”Jadi kalau untuk sementara ini mas,peran baru pembinaan dan pemberdayaan karang dan kalau untuk pengelolaan dari pemerintah kalurahan itu sendiri karang taruna kita selalu libatkan semua dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban,yang dimana kalau untuk perencanaan karang taruna di libatkan di musyawara,dan dilibatkan setiap rapat kita sendiri untuk pelaksanaan.dan salah satunya anggota karang taruna juga dilibatkan terus untuk pertanggung

jawababannya kita libatkan di realisasi pertanggung jawaaban untuk monitoring dan evaluasinya.”(Wawancara 28/04/2025)

Pernyataan Ibu Yulia Fatmawati menegaskan bahwa pemerintah kalurahan fokus pada pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna dengan melibatkan mereka secara aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban. keterlibatan Karang Taruna dalam musyawarah dan rapat perencanaan menunjukkan pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi pemuda menentukan arah program. Selain itu, anggota Karang Taruna juga konsisten dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan. Pendekatan ini memperkuat kapasitas Karang Taruna sebagai mitra pemerintah sekaligus memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga sinergi antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna menjadi kunci keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Kalurahan Triwidadi.

2. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Dalam Organisasi Dan Manajemen, Keuangan Dan Budaya

Dalam satu Kalurahan ada beberapa organisasi yang perlunya ada peran pemerintah kalurahannya sendiri contohnya karang taruna. namun faktor terdapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pemerintah kalurahan dalam peningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi. Faktor pendukung utama mencakup kebijakan pemerintah kalurahan yang memfasilitasi pengembangan Karang Taruna, yang dapat

meningkatkan kapasitas tata kelola. Selain itu, kerja sama dengan berbagai stakeholder, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk memperkuat kapasitas tersebut. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi di pemerintah desa dan Karang Taruna juga menjadi faktor penentu efektivitas tata kelola. Tak kalah penting, penganggaran yang memadai untuk pengembangan Karang Taruna dapat mendukung kelancaran kegiatan dan meningkatkan kualitas tata kelola. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur, dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintah desa. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan stakeholder lainnya juga dapat menurunkan efektivitas tata kelola. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan Karang Taruna menjadi tantangan tersendiri. Terakhir, dinamika masyarakat yang kompleks, termasuk perubahan sosial dan ekonomi, turut memengaruhi efektivitas tata kelola Karang Taruna. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah desa diharapkan dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas tata kelola Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Bapak Slamet Riyanto selaku Lurah Kalurahan Triwiwdadi diketahui Bahwa:

“Factor Pendukungnya anggran kegiatan dari kalurahan juga selalu hadir untuk mendukung serta mendorong untuk meningkatkan kapasitas karang melalui kegiatan-kegiatan salah satunya pelatihan yang sering dilakukan oleh kalurahan, sedangkan faktor penghambat: kalau soal hambatan sejauh ini mas, itu hanya soal waktu dikarena kan banyak kesibukan masing masing sehingga tidak ada waktu untuk semuanya hadir untuk berkumpul ketika ada suatu kegiatan.”(Wawancara 28/04/2025)

Dari pernyataan Bapak Slamet Riyanto menyoroti dua faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi. Faktor pendukungnya adalah konsistensi pemerintah kalurahan dalam menyediakan anggaran dan mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pemberdayaan pemuda. namun, faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan waktu anggota akibat kesibukan masing-masing, sehingga menghambat kehadiran dan koordinasi dalam kegiatan.

Secara keseluruhan, dukungan anggaran dan pelatihan menjadi modal penting bagi pengembangan Karang Taruna, namun perlu strategi fleksibel dalam pengelolaan waktu dan komunikasi agar partisipasi anggota tetap optimal. Pendekatan adaptif ini akan memastikan kegiatan Karang Taruna berjalan efektif dan berkelanjutan di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Bapak Ruswanto selaku Ketua Badan Permusyaratian Kalurahan (Bpkal) Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:



Gambar 3.4 Pelatihan di Kalurahan

“Secara umum tidak ada masalah besar mas. Namun, dalam beberapa kegiatan seperti pengelolaan parkir, pernah terjadi perselisihan soal pembagian hasil. Masalah seperti ini biasanya diselesaikan secara internal oleh pengurus Karang Taruna dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sedangkan kendala utama terletak pada keterlambatan pelaporan dari pamong, terutama terkait realisasi kegiatan. Hal ini bisa memengaruhi proses anggaran di tahun berikutnya dan perlu dievaluasi serius.”(Wawancara 05/05/2025)

Dari pernyataan Bapak Ruswanto menunjukkan bahwa kegiatan Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi berjalan lancar tanpa masalah besar, meski pernah terjadi perselisihan internal terkait pembagian hasil pengelolaan parkir. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara internal melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, menandakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Kendala utama adalah keterlambatan pelaporan dari pamong, terutama terkait realisasi kegiatan, yang berpotensi mengganggu proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Masalah ini perlu evaluasi serius agar pelaporan dapat tepat waktu dan akurat secara keseluruhan, meskipun Karang Taruna mampu mengelola konflik internal dengan baik, peningkatan disiplin pelaporan menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran penganggaran dan pelaksanaan program, sehingga pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Triwidadi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Mas Adam Nurcahyo selaku ketua Karang Taruna Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Factor pendukung ada peraturan yang mengarahkan Karang Taruna, dukungan anggaran dari APBKAL, dan fasilitas seperti sekretariat, tempat pertemuan, serta perlengkapan operasional disediakan

kalurahan. sedangkan faktor penghambat Kegiatan sering terbatas karena anggaran minim. Selain itu, anggota terbagi ke kegiatan tingkat dusun, sehingga fokus ke kalurahan kurang maksimal.”(Wawancara 28/04/2025)

Pernyataan Mas Adam Nurcahyo menjelaskan bahwa Karang Taruna Kalurahan Triwidadi didukung oleh peraturan yang jelas, anggaran dari APBKAL, serta fasilitas seperti sekretariat, tempat pertemuan, dan perlengkapan operasional yang disediakan pemerintah kalurahan. Dukungan ini menjadi modal penting bagi kelancaran kegiatan organisasi.namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran sehingga ruang gerak kegiatan menjadi terbatas. Selain itu, anggota yang terbagi fokus antara kegiatan tingkat dusun dan kalurahan menyebabkan perhatian terhadap program di tingkat kalurahan kurang maksimal, yang berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan. Meskipun didukung regulasi, anggaran, dan fasilitas, Karang Taruna perlu mengelola sumber daya dan koordinasi dengan lebih efektif untuk mengatasi keterbatasan dana dan pembagian fokus anggota, agar dapat berperan optimal dalam pemberdayaan pemuda dan masyarakat di kalurahan.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Ibu Widi Astuti selaku Kamitwo Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“jadi mas, faktor pendukung adalah banyaknya unit karang taruna di setiap padukuhan mas. Sedangkan kendala utamanya adalah kesibukan anggota sehingga tidak selalu bisa terlibat semua, namun kini sudah ada pembagian tugas berdasarkan bidang agar lebih fokus.”(Wawancara 28/04/2025)

Berdasarkan Pernyataan Ibu Widi Astuti menegaskan bahwa keberadaan banyak unit Karang Taruna di setiap padukuhan menjadi faktor

pendukung utama keberhasilan organisasi di Kalurahan Triwidadi, memungkinkan jangkauan kegiatan yang luas dan partisipasi masyarakat yang merata. Kendala utama adalah kesibukan anggota yang membatasi keterlibatan penuh dalam kegiatan. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan pembagian tugas berdasarkan bidang agar anggota dapat fokus pada tanggung jawab masing-masing. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga kegiatan Karang Taruna dapat berjalan lebih terorganisir dan optimal di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan oleh Mas Amarhanif selaku ketua 2 Karang Taruna Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

“Factor pendukung Pemerintah kalurahan menyediakan tempat atau aula untuk rapat dan kegiatan Karang Taruna, yang meski digunakan bersama kegiatan lain, sering dipakai untuk aktivitas Karang Taruna. Sedangkan factor penghambat adalah kurangnya pendanaan dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, kesibukan anggota (kuliah, kerja) menyebabkan hanya sekitar 30 dari 40-50 anggota yang aktif. Namun, sarana prasarana sudah membaik dengan adanya alat bantu seperti motor roda tiga, laptop, dan alat print.” (Wawancara 01/05/2025)

Melalui pernyataan Mas Amarhanif menegaskan bahwa dukungan fasilitas dari pemerintah kalurahan, seperti penyediaan aula rapat dan sarana prasarana seperti motor roda tiga, laptop, dan alat print, menjadi faktor pendukung utama kelancaran kegiatan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi. Meskipun aula digunakan bersama kegiatan lain, keberadaannya sangat membantu aktivitas organisasi.namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat.

Kesibukan anggota, terutama yang kuliah atau bekerja, membuat hanya sekitar 30 dari 40-50 anggota yang aktif, sehingga membatasi efektivitas program, meskipun fasilitas sudah membaik, tantangan pendanaan dan partisipasi anggota perlu diatasi dengan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar Karang Taruna dapat berperan optimal dalam pemberdayaan pemuda di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas berikut akan di jelaskan juga oleh Mas Nur Fauzi selaku Ketua Karang Taruna 3 Karang Taruna Kalurahan Triwidadi yang menyatakan bahwa:

”Factor pendukung adanya anggaran khusus dan pemenuhan fasilitas secara bertahap sangat membantu. Pelibatan aktif dalam kegiatan kalurahan juga menjadi bentuk dukungan nyata. sedangkan faktor penghambat adalah secara internal, anggota Karang Taruna memiliki kesibukan masing-masing, sehingga tidak semua bisa aktif terus-menerus. Dari segi anggaran, dukungan dari kalurahan belum mencakup seluruh kebutuhan sekitar 50% saja yang terfasilitasi. Sisanya harus dicari melalui sponsor, terutama untuk kegiatan besar seperti event olahraga dan pengajian.” (Wawancara 01/05/2025)

Berdasarkan pernyataan Mas Nur Fauzi menyoroti dukungan anggaran khusus dan pemenuhan fasilitas bertahap dari pemerintah kalurahan yang sangat membantu kelancaran kegiatan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi. Pelibatan aktif dalam kegiatan kalurahan juga memperkuat peran organisasi di masyarakat.namun, kendala utama adalah kesibukan anggota yang membatasi partisipasi aktif dan dukungan anggaran yang baru mencakup sekitar 50% kebutuhan. Sisanya harus diperoleh dari sponsor, terutama untuk kegiatan besar seperti event olahraga dan pengajian.

Secara keseluruhan, meskipun dukungan pemerintah menjadi modal penting, tantangan pendanaan dan keterbatasan partisipasi anggota perlu diatasi dengan strategi penggalangan dana yang efektif dan manajemen sumber daya manusia yang baik agar Karang Taruna dapat berperan optimal di Kalurahan Triwidadi.

3. Peningkatkan Kemampuan Masyarakat Dalam Kemandirian, Keswadayaan Dan Mengantisipasi Perubahan.

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan mengantisipasi perubahan merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, mandiri, dan adaptif. Upaya ini harus dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, agar masyarakat mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan tidak tergantung pada bantuan luar.

Berdasarkan pernyataan diatas, berikut akan di jelaskan juga oleh mas Muhtar Sari selaku anggota Karang Taruna Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Factor pendukung yaitu adanya dukungan pemerintah kalurahan sangat terasa mas, mulai dari anggaran, fasilitas, hingga pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota Karang Taruna. Sedangkan kendala utama adalah miskomunikasi antara Karang Taruna dan pemerintah kalurahan, serta kesenjangan antara generasi tua dan muda. Selain itu, jarangnya pertemuan anggota dan rasa sungkan untuk berkomunikasi juga menjadi hambatan.”(Wawancara 05/05/2025)

Dari pernyataan Mas Muhtar Sari selaku anggota Karang Taruna di atas menegaskan bahwa dukungan pemerintah kalurahan berupa anggaran, fasilitas, dan pelatihan sangat memperkuat Karang Taruna Kalurahan

Triwidadi. namun, kendala seperti miskomunikasi antara Karang Taruna dan pemerintah, kesenjangan generasi tua dan muda, serta jarangnya pertemuan dan rasa sungkan berkomunikasi menghambat kinerja organisasi. Meskipun dukungan pemerintah besar, peningkatan komunikasi efektif, penguatan hubungan antar generasi, dan peningkatan frekuensi pertemuan serta keterbukaan anggota sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut agar Karang Taruna dapat berperan optimal dalam pemberdayaan pemuda dan pembangunan di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas, berikut akan di jelaskan juga oleh Bapak Hermawan selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Factor pendukung adalah tersedianya anggaran, fasilitas, kerja sama yang baik antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna, serta dukungan masyarakat. Sedangkan factor penghambat Regenerasi belum berjalan lancar, masih bergantung pada pengurus senior. Calon pengurus baru sulit ditemukan di masing-masing padukuhan. Selain itu, pemerintah kalurahan belum memberikan tindak lanjut karena fokus terbagi ke banyak kegiatan lain. Evaluasi dilakukan melalui serapan anggaran, dan biasanya hanya diingatkan jika masih ada sisa anggaran.”(Wawancara 05/05/2025)

Berdasarkan pernyataan Bapak Hermawan menegaskan bahwa keberhasilan Karang Taruna Kalurahan Triwidadi didukung oleh anggaran dan fasilitas memadai, kerja sama baik dengan pemerintah kalurahan, serta dukungan masyarakat. namun, proses regenerasi pengurus belum berjalan lancar karena sulitnya mencari calon pengurus baru, sehingga masih bergantung pada pengurus senior. Pemerintah kalurahan juga belum memberikan tindak lanjut serius terkait hal ini karena fokus terbagi pada

banyak kegiatan lain. evaluasi kegiatan selama ini lebih bersifat administratif, hanya mengingatkan jika ada sisa anggaran, sehingga kurang menitip beratkan pada pengembangan organisasi. Meskipun demikian, dukungan anggaran dan kerja sama sudah baik, tantangan regenerasi dan evaluasi yang kurang komprehensif perlu mendapat perhatian serius. Upaya strategis dalam pembinaan pengurus baru dan evaluasi menyeluruh akan memperkuat keberlanjutan dan efektivitas Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas, berikut akan di jelaskan juga oleh Bapak Wajiono selaku Dukuh Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung meliputi dukungan fasilitas, pendanaan, pelatihan, dan rapat rutin dari pemerintah kalurahan dan LPMKAL, serta program dari dewan. Sedangkan faktor penghambat antara lain banyaknya minat anggota yang belum diimbangi dengan pengorganisasian yang baik, kurangnya sosialisasi kegiatan, serta kendala kehadiran karena pekerjaan sehingga kekompakan sulit tercapai.”(Wawancara 01/05/2025)

Berdasarkan pernyataan Bapak Wajiono dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna Kalurahan Triwidadi didukung oleh fasilitas, pendanaan, pelatihan, dan rapat rutin dari pemerintah kalurahan, LPMKAL, serta program dewan, yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas anggota dan kelancaran kegiatan. Namun, kendala utama adalah minat anggota yang tinggi belum diimbangi pengorganisasian yang baik, kurangnya sosialisasi kegiatan, dan kesibukan pekerjaan anggota yang menghambat kehadiran, sehingga kekompakan sulit tercapai. Di sisi lain meskipun dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sudah begitu kuat,

perbaikan pengorganisasian, peningkatan sosialisasi, dan pengelolaan waktu anggota perlu menjadi fokus agar Karang Taruna dapat lebih kompak dan efektif di Kalurahan Triwidadi.

Berdasarkan pernyataan diatas, berikut akan di jelaskan juga oleh Ibu Yulia Fatmawati selaku Carik Kalurahan Triwidadi menyatakan bahwa:

“Kalau untuk factor pendukungnya sendiri mas, ada pembinaan, pendanaan dan pembinaan antara lembaga dan Masyarakat. Sedangkan factor penghambat adalah setiap pelaksanaan kegiatan terkendala soal waktu dikarenakan pemuda karang tarunanya sibuk dengan berbagai kegiatan masing masing sehingga setiap pelaksanaan kegiatan harus kita menyesuaikan waktu kesibukan antara masing masing pemuda dikarenakan pemudanya ada yang sibuk kuliah, kerja dan sekolah mas.”(Wawancara 28/04/2025)

Berdasarkan peryataan Ibu Yulia Fatmawati dapat dilihat bahwa pembinaan berkelanjutan, pendanaan memadai, dan sinergi antara lembaga dan masyarakat menjadi faktor pendukung utama Karang Taruna Kalurahan Triwidadi.namun, faktor hambatan utama adalah keterbatasan waktu anggota akibat kesibukan kuliah, kerja, dan sekolah, sehingga penyesuaian jadwal kegiatan menjadi tantangan.hal demikian, meskipun dukungan pembinaan, pendanaan, dan kolaborasi kuat, pengelolaan waktu yang fleksibel dan strategi penjadwalan adaptif sangat diperlukan agar partisipasi dan efektivitas kegiatan Karang Taruna dapat optimal di Kalurahan Triwidadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam analisis yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambilkesimpulan bahwa proses pemerintah kalurahan triwidadi dalam peningkatankapasitas tata kelola karang taruna secara efektif sudah berjalan sesuai.

1. Peningkatan Kemampuan Individu Dalam Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap

Penelitian yang dilaksanakan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pemerintah kalurahan dalam upaya peningkatan kapasitas tata kelola organisasi kepemudaan. Temuan penelitian menunjukkan kompleksitas hubungan antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna yang mencerminkan kondisi umum pemberdayaan pemuda di tingkat masyarakat kalurahan, dimana terdapat potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan akibat berbagai kendala struktural dan operasional.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah menunjukkan kesadaran dan inisiatif dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendorong penguatan kelembagaan Karang Taruna. Manifestasi pemerintah kalurahan ini terlihat melalui implementasi fungsi

fasilitator yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti pendopo untuk kegiatan pertemuan dan dukungan logistik operasional.

Peran yang dijalankan melalui pemberian ruang partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa serta pengalokasian anggaran melalui mekanisme dana desa, meskipun masih dalam skala yang terbatas.

Peran pemerintah kalurahan tampak dari upaya mendukung proses regenerasi kepemimpinan dan penguatan struktur organisasi Karang Taruna, namun implementasinya masih bersifat sementara tanpa perencanaan yang matang. dan belum terinstitusionalisasi dalam sistem pembinaan yang terstruktur. Fungsi motivator dijalankan melalui pemberian dukungan moral dan legitimasi keberadaan organisasi, walaupun belum disertai dengan mekanisme pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Peran inovator mulai menunjukkan perkembangan positif melalui inisiatif pelatihan kepemudaan dan dukungan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi kalurahan.

Meskipun demikian, implementasi tersebut belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan. Keterbatasan utama terletak pada absennya kerangka kerja terpadu yang mengintegrasikan seluruh peran dalam satu sistem manajemen yang kohesif dan sistematik. Koordinasi antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna masih berjalan secara parsial dan reaktif, bukan proaktif dan terencana secara strategis.

2. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Dalam Organisasi Dan Manajemen, Keuangan Dan Budaya

Komitmen politik dari kepemimpinan kalurahan, khususnya lurah dan pamong, menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi pemuda dan menempatkan Karang Taruna sebagai komponen integral dalam strategi pembangunan desa. Ketersediaan sumber pendanaan melalui dana desa memberikan landasan finansial yang memungkinkan implementasi program-program pemberdayaan, meskipun pemanfaatanya masih belum maksimal. Hubungan interpersonal yang relatif harmonis antara pemerintah kalurahan dan pengurus Karang Taruna menciptakan atmosfer kerja sama yang positif dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Eksistensi semangat dan dedikasi dari segmen pemuda yang masih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi modal sosial yang berharga dalam menggerakkan dinamika organisasi.

Namun demikian, implementasi pemerintah kalurahan juga menghadapi serangkaian hambatan struktural dan operasional yang signifikan. Fenomena rendahnya partisipasi anggota Karang Taruna, yang sebagian besar disebabkan oleh mobilitas geografis pemuda yang merantau atau bekerja di luar desa, menciptakan kesenjangan antara idealitas organisasi dengan realitas keterlibatan aktif anggota. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam membangun ritme organisasi yang konsisten dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam Kemandirian, Keswadayaan Dan Mengantisipasi Perubahan

Ketiadaan pola pembinaan yang sistematis dan terstruktur menjadi hambatan fundamental yang menghambat pengembangan kapasitas organisasi secara holistik. Minimnya program pelatihan yang berkelanjutan dan terintegrasi mengakibatkan stagnasi dalam peningkatan kompetensi pengurus dan anggota Karang Taruna. Kelemahan dalam aspek dokumentasi dan administrasi kegiatan mencerminkan belum matangnya sistem tata kelola organisasi yang profesional. Masalah komunikasi yang belum sepenuhnya intensif antara lembaga pemerintahan desa dan Karang Taruna menghasilkan pola pengambilan keputusan yang cenderung top-down dan kurang partisipatif. Kondisi ini berpotensi mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab dari kalangan pemuda terhadap program-program yang diimplementasikan, sehingga berkelanjutan program menjadi dipertanyakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait, khususnya dalam penguatan tata kelola organisasi Karang Taruna di Kalurahan Triwidadi.

1. Penyusunan Kerangka Kerja Terpadu

Pemerintah kalurahan perlu menyusun sistem manajemen pembinaan

Karang Taruna secara terstruktur, kohesif, dan terintegrasi, mencakup peran fasilitator, motivator, dan inovator dalam satu dokumen kebijakan operasional.

2. Penguatan Sistem Pembinaan dan Regenerasi

Dibutuhkan program pembinaan berkelanjutan yang menjamin regenerasi kepemimpinan Karang Taruna tidak bersifat sementara tanpa perencanaan yang matang. Sistem kaderisasi harus dirancang dengan tahapan yang jelas, termasuk mentoring dari pamong desa.

3. Optimalisasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Pemuda

Alokasi dana desa perlu diperkuat dan diarahkan secara spesifik untuk program pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan penguatan kapasitas organisasi, agar pemanfaatannya tepat guna dan berdampak nyata.

4. Pengembangan Program Pelatihan Terintegrasi

Pemerintah kalurahan perlu memfasilitasi pelatihan rutin dan terjadwal, baik teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota Karang Taruna.

5. Peningkatan Kualitas Dokumentasi dan Tata Kelola Organisasi

Perlu dibangun sistem administrasi dan dokumentasi kegiatan yang rapi, akuntabel, dan berkelanjutan, agar Karang Taruna memiliki rekam jejak yang valid dan bisa dijadikan dasar evaluasi serta pelaporan.

6. Penguatan Komunikasi dan Mekanisme Partisipatif

Intensifikasi komunikasi antara pemerintah kalurahan dan Karang Taruna

perlu dilakukan melalui forum rutin, agar pengambilan keputusan lebih partisipatif dan bottom-up, meningkatkan rasa memiliki dari kalangan pemuda.

7. Strategi Menangani Rendahnya Partisipasi Pemuda

Pemerintah kalurahan bersama Karang Taruna perlu melakukan pemetaan potensi dan preferensi pemuda lokal, serta merancang program yang fleksibel dan relevan dengan realitas pemuda perantauan (misal: program online, kegiatan musiman, dll).

8. Penguatan Komitmen Politik dan Dukungan Legislatif

Diperlukan dorongan dari lurah dan pamong untuk menginstitusionalisasi peran Karang Taruna dalam RPJM Kalurahan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, agar peran organisasi ini diakui dan didukung secara legal dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alva Beriansyah, Haryadi, & Sutri Destemi Elsiartati. (2022). Penguatan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Pemuda dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Tantan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.
- Andri, Isabella, & Amaliatulvalidain. (892023). Kontribusi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Karang Taruna. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri*, Vol. 10, No. 01, hal. 2716-3474, Oktober 2023.
- Asmanang, I., dkk. (2020). Administrasi Pemerintahan Desa.
- Bender, R. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Beriansyah, A., Haryadi, & Elsiartati, S. D. (2022). Penguatan Organisasi Kepemudaan Dan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Tantan Kabupaten Muaro Jambi. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2).
- Bogdan, RC, & Biklen, SK. (1992). Penelitian kualitatif untuk pendidikan: Pengantar teori dan metode. Allyn dan Bacon.
- Darmansyah, A., Budiman, S., & Candra, D. (2014). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faozan, Haris. (2006). Penguatan Kapasitas dan Dampaknya.
- Gartika, Dwi. (20). Penguatan Kapasitas dalam Komunitas.
- Gubernur DIY. (2019). Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Haryono, Agus. (2017). Penguatan Kapasitas Organisasi dan Reformasi Kelembagaan.
- Herdiana, Mukti. (2019). Pemberdayaan Karang Taruna oleh Pemerintah Desa di Desa Winduraraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Jurnal*, Vol. 06, No. 03, hal. 2614-2945, September 2019.
- Hiryanto, E. T., & Miftahuddin. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengurus Karangtaruna melalui Optimalisasi Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1).

- Horoepoetri, & Santosa. (2003). Peran dalam masyarakat: Dimensi-dimensi peran dalam kehidupan sosial. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Indrawati, T., Aminatuzzuhro, & Iswoyo, A. (2023). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna Dalam Mengembangkan Desa 1001 Tanaman Hias di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mitra dalam Pengabdian*, 6, 2655-3570.
- Junaid Gazalin, La Asiri, Sry Mayunita, Ade Rahman, & Hengky. (2023). Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna dalam Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kinerja Organisasi. *Community Development Journal*, 4(2), 3183-3190.
- Jusnaeni, N. (2017). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 56-68.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Peran. KBBI Online. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Karbulah, Ahmad. (2019). Pemerintahan Modern: Konsep, Fungsi, dan Tantangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 50.
- Khaldun, Rendra. (2016). Pemberdayaan (Pemuda) Karang Taruna Dalam Meningkatkan Dan Menumbuhkan Minat Bisnis Kreatif Di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Transformasi*, Vol. 12, No. 2, Hal. 168-185.
- Langkay, E. R., Dengo, S., & Kolondam, H. F. (2022). Pemberdayaan organisasi Karang Taruna di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal*, VIII (114), 2338–9613.
- Lepa. (n.d.). Peran dalam kehidupan masyarakat: Pengertian dan dimensi peran dalam interaksi sosial. Yogyakarta: Penerbit Insani.
- Manan, A. (2001). Filosofi Pemerintahan Negara.
- Meuraksa, M., & Saputra, R. (2020). Pengembangan generasi muda melalui organisasi karang taruna.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neng Yeyet. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 06, No. 04, Hal. 2614-2945, Desember 2019.

- Nursyamsu, R. (2018). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Pembuatan Program Kerja Pada Organisasi Pemuda Desa Cibinuang, Kabupaten Kuningan. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 37-44.
- Nusantara, W., Roesminingsih, M. V., Siswanto, H., & Widyaawati, M. (2022). Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa Temu Melalui Design Thinking Process. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 13(3), 2107-2116.
- Oktaviani, D., dkk. (2019). Teori sosial dan pengaruh lingkungan terhadap sikap peduli sosial.
- Prabowo, S., & Yani, F. (2018). Kepedulian sosial dalam masyarakat desa.
- Rasyid, R. (2017). Teori Pemerintahan dan Administrasi Negara.
- Riandita, N., & Sarfah, E. (2021). Tata Kelola Dana Desa Karang Taruna Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Komunikasi dan Bisnis, 3(2).
- Rintjap, Luh, dkk. (2018). Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Meningkatkan Kemampuan Organisasi dan Individu.
- Ryaas Rasyid, & Muhamad Lobolo. (2010). Pembangunan dan Pemerintahan Desa.
- Sugiyono, D. (2009). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2014). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2015). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Y. (2016). Organisasi Pemerintah dan Implementasi Kebijakan Publik.
- Sumpeno, Y. (2002). Penguatan Kapasitas dalam Pembangunan Masyarakat.
- Suradi. (2019). Karang Taruna, Agen Perubahan Dan Pengembangan Masyarakat Di Pandeglang. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI, Vol. 8, No. 03, Mei - Agustus, 2019.

- Suradi. (2019). Pemuda sebagai agen perubahan bangsa. Hal. 24.
- Syafiie, S. (2015). Pemerintahan dan Kewenangan Negara.
- Syarif, M. (2019). Penguatan kapasitas organisasi masyarakat.
- Usman, M. (2009). Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H. (2003). Pemerintahan Desa: Aspek Hukum dan Praktik di Lapangan. Jakarta: Penerbit Rajawali

Perundang- Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2022 tentang Keputusan Gubernur DIY
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan

LAMPIRAN

Dokumentasi



Foto Bersama Pak Lurah



Foto Bersama Ibu Carik



Foto Bersama Ibu Kamitua



Foto Bersama Ketua Karang Taruna



Foto Bersama Pak Wakil
Bamuskal



Foto Bersama Anggota Karang
Taruna



Foto Bersama Pak Dukuh
Kayuhan Wetan



Foto Bersama Ketua Bamuskal



Foto Bersama Ketua 2 Karang
Taruna



Foto Bersama Ketua 3 Karang
Taruna



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 061/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yosua Kristian Likku
No. Mahasiswa : 21520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A





Nomor : 204/1/U/2025

Hal : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yosua Kristian Likku
No Mhs : 21520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Karang Taruna
Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

Akreditasi Institusi B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECUALI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECUALI
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECUALI
PROGRAM STUDI KEGURUAN DAN PENDIDIKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECUALI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 108/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yosua Kristian Likku
Nomor Mahasiswa : 21520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan,
Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kapasitas
Tata Kelola Karang Taruna
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 Maret 2025



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



Nomor : 000.9.6.3/00051
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua STPMD APMD Yogyakarta
Di Yogyakarta

Dengan hormat,
Berdasarkan surat dari STPMD APMD Yogyakarta Nomor : 108/I/T/2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi. Dengan ini Kami Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : **YOSUA KRISTIAN LIKKU**
NIM : 21520057
Program Study : Ilmu Pemerintahan (S1)
Tema/Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Karang Taruna.
Lokasi : Kalurahan Triwidadi
Waktu : April - Mei 2025

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

